

PENGARUH
***GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN**
PROFITABILTASTERHADAP *TAX AVOIDANCE*
(STUDI EMPIRIS PADA SEKTOR INDUSTRI DASAR
DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA PERIODE 2015-2020)

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:

Siti Hartinah

1501035039

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2022

HALAMAN PENGESAHAN


Judul Penelitian : Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Industri Dasar dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

Nama Mahasiswa : Siti Hartinah
NIM : 1501035039
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : S1 - Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 29-08-2022
Pembimbing,


Dr. H. Zaki Fakhroni, Ak., CA., CTA., CFA., CSRS., CIOaR
NIP. 19801224 200801 1 006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si
NIP. 19620513 198811 2 001

Lulus Ujian Tanggal: 28 Juni 2022

SKRIPSI INI TELAH DI UJI DAN DINYATAKAN LULUS

Judul Penelitian : Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2020)

Nama : Siti Hartinah

NIM : 1501035039

Hari : Selasa

Tanggal Ujian : 28 Juni 2022

TIM PENGUJI

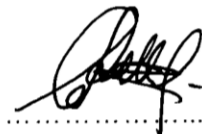
1. Dr. H. Zaki Fakhroni, Ak., CA., CTA., CFA., CSRS., CIQaR
NIP. 19801224 200801 1 006

1.



2. Salmah Pattisahusiwa, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS
NIP. 19720107 200003 2 001

2.



3. Muhammad Iqbal, S.Pd., M.Si
NIP. 19900818 201903 1 012

3.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 15 Juni 2022



Siti Hartinah

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulaarman, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Hartinah
NIM : 1501035039
Program Studi : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada pihak UPT. Perpustakaan Universitas Mulaarman. Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Industri Dasar dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Non-Eksklusif ini kepada UPT. Perpustakaan Universitas Mulaarman berhak menyimpan, mengalih, media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Samarinda, 29 Agustus 2022
Yang menyatakan



Siti Hartinah

RIWAYAT HIDUP

Siti hartinah lahir di Desa Semayang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 17 Desember 1997. Anak ke dua dari 2 bersaudara. Putri dari pasangan Bapak Akhmadi dan Ibu Estikamah. Bertempat tinggal di Desa Semayang Kec. Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.

Pada tahun 2005-2010 penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar Negeri 001 Desa Semayang, tahun 2010-2012 melanjutkan pendidikan MTS Bahrul Ulum Semayang , tahun 2012-2015 menempuh pendidikan SMAN 01 di Kota Bangun. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Mulawarman sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Samarinda, 29 Agustus 2022

Penulis

ABSTRAK

Siti Hartinah 2022. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme *Good Corporate Governance* yang di proksikan dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode penelitian 2015-2020 dengan menggunakan *Purposive Sampling* sehingga diperoleh jumlah sampel akhir penelitian sebanyak 70 sampel. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, variabel komite audit tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Tax Avoidance*, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas.

ABSTRACT

Siti Hartinah 2022. The study purpose is to perceive and analyze the mechanism of Good Corporate Governance as proxied by institutional ownership, independent commissioners, audit committees and profitability on tax avoidance. The data used were secondary data in the form of annual reports and financial statements of companies in the basic and chemical industry sectors listed on the Indonesia Stock Exchange since 2015-2020 research period using purposive sampling so that the final sample size obtained of the study were 70 samples. The results of the study indicate simultaneously that institutional ownership and independent commissioners have a significant positive effect on tax avoidance, the audit committee variable has not react and no significant effect on tax avoidance, while profitability has not a significant negative effect on tax avoidance.

Keywords: *Tax Avoidance, institutional ownership, Independent Board of Commissioners, audit committee, Profitability.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala karunia, berkah dan limpahkan rahmat-nya, serta junjungan kita nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si selaku Rektor Universitas Mulawarman
2. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
3. Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas dan Bisnis Universitas Mulawarman.
4. Dr. H. Zaki Fakhroni, Ak., CA., CTA., CfrA ., CIQaR selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman sekaligus dosen pembimbing yang telah memberi banyak saran dan masukan untuk penulis dalam penyusunan skripsi .
5. Raden Priyo Utomo, SE.,MSi.,Ak.,CA selaku dosen wali yang telah meluangkan waktu selama proses pembimbingan Akademik.

6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya dosen program studi Akuntansi yang telah memberikan bantuan, pengetahuan dan bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan dan juga staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, yang dengan penuh keikhlasan memberikan layanan terbaik.
7. Kepada orang tua saya yang saya hormati dan sayangi Bapak Akhmadi dan Ibu Estikamah yang selalu memberikan dukungan baik secara moral maupun material, semangat dan do'a kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada saudara saya yang saya sayangi Juhdinnur A.Md yang selalu memberikan dukungan moral maupun material kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dengan terbuka penulis menerima kritik dan saran guna perbaikan skripsi ini.

Samarinda

Siti Hartinah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN IDENTITAS PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1. Landasan Teori	8
2.1.1. Teori Keagenan (Agency Theory)	8
2.1.2. Penghindaran pajak (<i>Tax avoidance</i>)	10

2.1.3.	Good Corporate Governance (GCG)	11
2.1.3.1.	Kepemilikan Institusional	13
2.1.3.2.	Dewan komisaris independen	13
2.1.3.3.	Komite Audit.....	14
2.1.4.	Profitabilitas.....	15
2.2.	Penelitian Terdahulu	15
2.3.	Kerangka Konsep Penelitian.....	18
2.4.	Pengembangan Hipotesis	19
2.4.1.	Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>tax avoidance</i> ...	19
2.4.2.	Pengaruh dewan komisaris independen terhadap <i>tax avoidance</i>	20
2.4.3.	Pengaruh komite audit terhadap <i>tax avoidance</i>	21
2.4.4.	Pengaruh Profitabilitas terhadap <i>tax avoidance</i>	22
2.5.	Model Penelitian	23
BAB III METODE PENELITIAN		24
3.1.	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	24
3.1.1.	Variabel Terikat (<i>Dependent Variable</i>).....	24
3.1.2.	Variabel Bebas (Independent Variable)	24
3.2.	Jenis dan Sumber Data	26
3.3.	Populasi dan Sampel Penelitian	27
3.4.	Metode Pengumpulan Data	28
3.5.	Metode Analisis Data	29
3.5.1.	Statistik Deskriptif.....	29
3.5.2.	Uji asumsi klasik	29
3.5.2.1.	Uji normalitas	29
3.5.2.2.	Uji Multikolinearitas.....	30
3.5.2.3.	Uji Heteroskedastisitas	30

3.5.2.4. Uji Autokorelasi.....	31
3.5.3. Analisis Regresi Linear Berganda.....	31
3.5.4. Uji Hipotesis.....	32
3.5.4.1. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	32
3.5.4.2. Uji Simultan (Uji F).....	32
3.5.4.3. Pengujian secara parsial (uji t).....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1. Deskripsi Objek Penelitian	34
4.2. Analisis Data.....	35
4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif	35
4.2.2. Uji Asumsi Klasik	37
4.2.2.1. Uji Normalitas	37
4.2.2.2. Uji Multikolinieritas	39
4.2.2.3. Uji Heteroskedatisitas	40
4.2.2.4. Uji Autokorelasi.....	41
4.2.3. Analisis Regresi Linier Berganda	42
4.2.4. Hasil Uji Hipotesis	44
4.2.4.1. Koefisien Determinasi (R^2).....	44
4.2.4.2. Uji Simultan (Uji F).....	44
4.2.4.3. Pengujian Secara Parsial (Uji t).....	45
4.3. Pembahasan	47
4.3.1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	47
4.3.2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	47

4.3.3. Pengaruh Komite Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	49
4.3.4. Pengaruh Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	50
BAB V PENUTUP	52
5.1. Kesimpulan.....	52
5.2. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	57

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3.1 Kriteria pemilihan sampel.....	28
Tabel 4.1. Kriteria Pemilihan Sampel.....	34
Tabel 4.2. Hasil Statistik Deskriptif.....	35
Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas 1	38
Tabel 4.4 Uji Normalitas 2 Setelah Outlier.....	38
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas.....	39
Tabel 4.6. Hasil Uji Autokolerasi	41
Tabel 4.7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda	42
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	44
Tabel 4.9. Hasil Uji Simultan (F).....	45
Tabel 4.11. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis	46

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian.....	19
Gambar 2.1 Model Penelitian	23
Gambar 4.1. Hasil dari uji Heteroskedastisitas	40

DAFTAR SINGKATAN

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BEI	Bursa Efek Indonesia
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CEO	<i>Chief Executive Officer</i>
CETR	<i>Cash Effective Tax Rate</i>
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
GCG	<i>Good Corporate Governance</i>
GPM	<i>Gross Profit Margin</i>
ICTD	<i>International Center for Taxation and Development</i>
IKA	Ikatan Komite Audit Indonesia
IMF	<i>International Monetary Fund</i>
KNKCG	Komite Nasional Kebijakan <i>Corporate Governance</i>
LOI	<i>Letter of Intent</i>
OECD	<i>Organization for Economic Cooperation and Development</i>
PDB	Produk Domestik Bruto
ROA	<i>Return on Assets</i>
ROE	<i>Return on Equity</i>
Rp	Rupiah
SPSS	<i>Statistical Package for Social Science</i>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Daftar Perusahaan yang Memenuhi Kriteria Sampel	57
Lampiran 2. Data lampiran sebelum outlier.....	57
Lampiran 2. Sambungan	58
Lampiran 2. Sambungan	59
Lampiran 2. Sambungan	60
Lampiran 2. Sambungan	61
Lampiran 2. Sambungan	62
Lampiran 3. Data outlier	62
Lampiran 3. Sambungan	63
Lampiran 3. Sambungan	64
Lampiran 4. Data setelah Outlier	64
Lampiran 4. Sambungan	65
Lampiran 4. Sambungan	66
Lampiran 4. Sambungan	67
Lampiran 5.1. Kertas Kerja Sebelum Tabulasi Data	68
Lampiran 5.1 Sambungan	69
Lampiran 5.2 Kertas Kerja KoIn dan KOA	71
Lampiran 5.2 Sambungan	72
Lampiran 5. Sambungan	73
Lampiran 5.3. ROE	73
Lampiran 5.3. Sambungan	74

Lampiran 5.3 Sambungan	76
Lampiran 5.4. ETR	76
Lampiran 5.4. Sambungan	77
Lampiran 5.4. Sambungan	78
Lampiran 5.4. Sambungan	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan (UU Pasal 1 No. 28 tahun, 2007), yang mendefinisikan pajak sebagai iuran paksa ke kas negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan tanpa janji pengembalian. Pajak digunakan pemerintah untuk kemajuan serta pembangunan negara yang berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Namun pada masa pandemi *covid-19* beberapa sektor mengalami perubahan karena terbatasnya suatu aktifitas yang berdampak pada sistem perekonomian negara tidak terkecuali di sektor perpajakan. APBN tahun 2020 ini terealisasi sebesar Rp. 1,072,1 triliun (atau 19,6 persen) lebih rendah dari tahun ini Rp. 1.072,1 triliun (atau 19,6 persen), menurut data pelaksanaan APBN 2020. Target APBN dari Perpres tersebut tercapai sebesar 89,4 persen. Sekitar Rp. Diperlukan 126,7 triliun untuk memenuhi kekurangan tersebut, atau 72 (Kementerian Keuangan, 2020). Pendanaan tambahan sebesar Rp945,8 triliun direalisasikan dari faktor *shortfall* sehingga defisit anggaran menjadi 6,1 persen dari PDB (PDB).

Pada 2016 lansiran IMF menyebutkan bahwa Indonesia termasuk dalam deretan kasus penghindaran pajak terbesar hal tersebut membuktikan bahwa masih ada perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak secara berlebihan dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang serta masih terdapat perusahaan yang belum sepenuhnya menerapkan *Good Corporate Governance*.

Penghindaran pajak adalah praktik menghindari pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah hukum secara legal dalam kode pajak suatu negara. Dalam wilayah abu-abu antara kepatuhan pajak dan penghindaran pajak, penghindaran pajak diperbolehkan sepanjang tidak melanggar ketentuan perpajakan tetapi mempengaruhi penerimaan pajak negara (Pohan, 2013).

Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* penggelapan pajak itu ditemukan, termasuk di Indonesia, sebesar US\$4,78 miliar (sekitar Rp67,6 triliun). Selain itu, wajib pajak orang pribadi menyumbang sisa Rp 1,1 triliun (\$78,83 juta) (Kompas.com).

Perusahaan di bidang manufaktur, seperti PT. Cola-Cola Indonesia (CCI), juga bersalah melakukan penghindaran pajak, karena perusahaan gagal melakukan pembayaran pajak sebesar Rp 49,24 miliar. Berdasarkan hasil pemeriksaan DJP, terjadi pembengkakan biaya yang besar antara tahun 2002 dan 2006. Karena penghasilan kena pajak yang lebih rendah, pembayaran pajak berkurang akibat beban yang tinggi. Biaya iklan mencapai Rp566,84 miliar antara tahun 2002-2006. DJP menyatakan bahwa PT. PKP CCI berjumlah Rp. 603,48 miliar pada periode tersebut, sedangkan PT. PKP CCI hanya Rp. 492,59 miliar pada periode itu. DJP memperkirakan PT. CCI berutang pajak balik sebesar Rp49,24 miliar akibat perbedaan ini. (Kompas.com)

Jika dilihat dari beberapa fenomena diatas dan juga dalam segi pelaksanaan perpajakan ada beberapa perbedaan kepentingan antara pemungut pajak (fiskus) dan wajib pajak (perusahaan) dimana dalam sisi pajak menginginkan penerimaan

pajak secara maksimal karena pendapatan dalam sektor perpajakan tersebut merupakan pendapatan negara yang paling besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan bagi wajib pajak (perusahaan) Hal ini bertentangan dengan kepentingan pelaku usaha yang mencari beban pajak yang paling ringan karena berdampak negatif terhadap bottom line mereka. Karena penyebab ini, pajak dapat memicu penghindaran pajak dalam bisnis.

Sistem tata kelola perusahaan juga merupakan faktor dalam penghindaran pajak. Untuk memaksimalkan nilai pemegang saham, perusahaan harus memprioritaskan keunggulan kompetitif jangka panjang, produk dan layanan unggulan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan lainnya, sebagaimana dituangkan dalam Kep-117/M-MBU/2002. Ini adalah proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan kesuksesan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.

Good Corporate Governance Pada tahun 1997, ketika negara itu dilanda krisis ekonomi, mereka menjadi terkenal di seluruh Indonesia. Banyak bisnis bangkrut akibat krisis keuangan, yang berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan. Krisis ekonomi politik di Indonesia dimulai pada tahun 1997 karena tata kelola yang buruk. Pemerintah Indonesia juga telah menunjukkan minat yang kuat dalam penerapan GCG, terbukti dengan peraturan yang mengaturnya. Pembentukan Komite Nasional Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (KNKCG) pada tahun 1999 merupakan langkah yang tepat dalam hal peningkatan tata kelola perusahaan. Untuk meningkatkan tata kelola di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan pedoman dan membentuk komite baru untuk menggantikan

komite sebelumnya, yaitu KNKCG. Sub Komite Publik dan Sub Komite Korporat akan bekerja sama untuk mengimplementasikan pedoman tersebut. Ketua SE juga menerbitkan SE Ketua Bapepam Nomor Se-03/PM/2000, yang menyerukan agar komite audit dimiliki oleh masing-masing entitas dan peraturan Bank Indonesia (No. PBI). PBI No. 2006 tentang perubahan GCG yang diusulkan oleh PBI 8/4/2006. Karena penghindaran pajak sering kali melibatkan kerahasiaan, yang dapat mengurangi kemampuan publik untuk menilai perusahaan secara adil, sistem pengawasan perusahaan yang solid sangat penting bagi bisnis yang terlibat dalam praktik tersebut untuk memastikan bahwa pajak dibayar dengan cara yang seefisien mungkin (Ngadiman & Puspitasari, 2017) Fakta bahwa begitu banyak bisnis di Indonesia yang menghindari pajak menunjukkan betapa buruknya sistem tata kelola negara yang diterapkan I Gusti Ayu C.M., & K.A. Suardana (2014). Kepemilikan institusional dan komite audit adalah dua contoh mekanisme yang dapat digunakan untuk menerapkan struktur tata kelola.

Menurut Shleifer & Vishny R.W (1986) Kehadiran pemegang saham utama, terutama kepemilikan institusional, menandakan komitmen terhadap standar pengawasan tertinggi oleh manajemen perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Fenny Winata (2014) menyatakan bahwa *Agency Problems* perusahaan dan peluang untuk penghindaran pajak akan berkurang dan konflik kepentingan manajemen akan berkurang dengan proporsi kepemilikan institusional yang lebih tinggi dalam struktur kepemilikan perusahaan. Selain kepemilikan institusional mekanisme GCG yang digunakan adalah komite audit. Ikatan Komite Audit Indonesia menyatakan bahwa komite audit memberikan kontribusi yang besar

bagi perusahaan. Untuk alasan sederhana bahwa komite audit bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan.(Agustina & Aris, 2016) percaya bahwa perusahaan dengan komite audit yang memiliki wewenang untuk memantau semua kegiatan di perusahaan, akan lebih bertanggung jawab dan terus terang dalam penyajian laporan keuangan perusahaan.

Faktor lain, seperti profitabilitas, dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak selain manajemen yang baik. I Gusti Ayu C.M, & K.A. Suardana (2014) Profitabilitas adalah indikator utama kesehatan perusahaan. Istilah profitabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari waktu ke waktu, berdasarkan penjualan, aset, dan modal sahamnya sedangkan menurut Kasmir, (2014) Rasio keuangan seperti profitabilitas membantu menentukan nilai sebenarnya perusahaan dengan menentukan apakah mampu menghasilkan laba atau tidak. Profitabilitas dapat dihitung dengan *gross profit margin, operating profit Margin, net profit margin, return on investment, return on equity, return on common stock equity, return on assets, earning per share* dan *basic earning power*. Namun pada penelitian ini penulis menggunakan indikator yang berdeda dari penelitian terdahulu dengan menggunakan indikator return on equity (ROE) sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan (ROA) sebagai pengukur rasio profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Menurut penelitian dari Ariawan & Setiawan (2017) Profitabilitas yang di hitung dengan menggunakan rasio *ROE* berpengaruh positif. Namun dari hasil penelitian I Gusti Ayu C. M.,&

K. A. Suardana (2014) Menunjukkan bahwa profitabilitas yang dihitung dengan rasio *Return on Assets* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Penulis melakukan penelitian tentang hubungan antara kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan profitabilitas dalam penghindaran pajak di seluruh industri (termasuk sektor industri dasar dan kimia) dan pendekatan metodologis (termasuk perbedaan dalam pengukuran variabel). Karena pengaruhnya yang signifikan terhadap penerimaan pajak, penulis memilih untuk menyoroti industri dasar dan kimia dalam analisisnya. Maka penelitian ini dilakukan penulis untuk menguji kembali faktor-faktor yang diuraikan dalam latar belakang diatas dengan menggunakan sektor dan periode penelitian terbaru periode 2015-2020 dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2020.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*?
4. Apakah Profitabilitas yang di ukur dengan *ROE* berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di kemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. *Good corporate governance* dan laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak; studi ini menambah tubuh pengetahuan yang digunakan dalam literatur akuntansi dan menyediakan akademisi dengan data tambahan dan sumber untuk menarik dari.
2. Studi ini bertujuan untuk membantu pemegang saham dan investor dengan menjelaskan fitur-fitur perusahaan yang memfasilitasi penghindaran pajak dan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik.
3. Jika penelitian ini membantu pemerintah untuk mempertimbangkan dan menerapkan kebijakan yang lebih baik untuk mengurangi penghindaran pajak, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Jensen & Meckling (1976) Jelaskan bagaimana hubungan pemegang saham dan manajer dipengaruhi oleh teori keagenan. Manajemen bergantung pada dukungan keuangan dari pemegang saham. Sedangkan manajemen untuk memastikan bahwa kepentingan agen dan tujuan perusahaan terpenuhi. Menurut Eisenhardt (1989) *Agency Theory* didasarkan atas beberapa asumsi. Asumsi sifat manusia, asumsi organisasi, dan asumsi informasi adalah tiga kategori utama dari asumsi ini. Menurut kodrat manusia, manusia memiliki sifat egois yang tidak memiliki rasionalitas dan menghindari risiko. Pemegang saham dan manajer memiliki informasi yang asimetris, sesuai dengan asumsi organisasi, yang berarti akan terjadi konflik di antara anggota organisasi. Asumsi umum adalah bahwa data adalah komoditas yang dapat dipertukarkan. Peran independen untuk memantau tindakan manajer (*agen*) dan melihat apakah sudah sesuai dengan keinginan pemegang saham sementara mereka bertindak sebagai mediator antara pemegang saham dan manajer. Ketika agen mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan perusahaan dan investor, hal ini dapat menimbulkan konflik keagenan. Untuk meminimalisir konflik agensi perlu suatu pengawasan dengan dengan menyelaraskan tujuan dari pihak agen maupun pihak prinsipal melalui peningkatan kepemilikan institusional. Ketika agen dan prinsipal mengupayakan untuk memaksimalkan utilitasnya, jika tidak, ada alasan kuat untuk mencurigai

bahwa agen tidak akan selalu bertindak sesuai namun, hal ini dapat dikurangi jika prinsipal memberikan insentif yang memadai bagi agen dan melakukan pemantauan yang tepat untuk membatasi agen yang menyimpang; melakukannya, bagaimanapun, menimbulkan biaya agensi.

Menurut Jensen & Meckling (1976) biaya keagenan adalah jumlah dari biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen, dalam rangka pengambilan keputusan yang optimal dari sudut pandang prinsipal. Jika perusahaan tidak dikenakan biaya agensi, ini bukan pilihan. Meckling membagi biaya keagenan ke dalam tiga kategori: biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal dalam memantau tindakan agen mereka, biaya yang dikeluarkan oleh agen dalam memajukan kepentingan prinsipal mereka, dan kerugian yang timbul sebagai akibat dari pilihan yang tidak tepat yang dibuat oleh agen. sesuai dengan kebutuhan kepala sekolah.

Ketika ada lebih banyak komisaris independen di sebuah perusahaan, lebih mudah untuk mengawasi perilaku oportunistik manajer karena teori keagenan, yang menyatakan bahwa lebih banyak komisaris sama dengan sistem kontrol yang lebih kuat (Jensen & Meckling, 1976).

Kaitan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah bahwa dalam corporate governance, perusahaan dengan tata kelola yang buruk menimbulkan konflik kepentingan yang berdampak pada praktik penghindaran pajak, dan dalam teori keagenan dikatakan, adalah pihak yang menyediakan sumber daya kepada perusahaan. agen agar agen bertindak selanjutnya, mengejar pilihan berdasarkan kepentingan dan tujuan prinsipal. Komisaris independen yang tidak memiliki

ikatan dengan anggota komisi lainnya akan memastikan bahwa manajemen perusahaan tidak mengambil keuntungan dari tindakan manajemen yang oportunistik atau mengutamakan kepentingan diri sendiri.

Sedangkan KOA merupakan bagian terpenting dimiliki entitas ketika seorang agen (manajer) dan pihak prinsipal (pemegang saham) mengharapkan laba yang maksimal tentu perusahaan akan megupayakan untuk membuat laporan keuangannya menunjukan laba tinggi dengan meminimkan hutang atau beban pajaknya (Gita Liony Putri, 2018), sedangkan organisasi yang memiliki *value* akan menjalani tahap audit, di mana pekerjaan komite audit dalam dan diluar entitas, dapat memengaruhi seberapa berhasil bisnis menghindari pembayaran pajak. Maka tata kelola suatu organisai yang layak sangat memiliki peran aktif dalam praktik *tax avoidance*.

Begitu pula dengan profitabilitas yang merupakan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset. Pada penelitian ini, rasio yang gunakan adalah *return on equity*. Misalnya, jika pemungut pajak (fiskus) mengharapkan pendapatan maksimum dari pemungutan pajak, tetapi manajemen perusahaan (fiskus) ingin menghasilkan keuntungan yang signifikan dengan membatasi tarif pajak, maka teori keagenan menjelaskan bahwa dapat terjadi konflik antara kepentingan keuntungan perusahaan antara pemungut pajak dan agen pajak (Puput Rahayu, 2019).

2.1.2. Penghindaran pajak (*Tax avoidance*)

Aturan praktisnya adalah meminimalkan pajak yang dihasilkan dengan mempertimbangkan konsekuensinya. Karena wajib pajak hanya berusaha untuk

mengurangi, meringankan, atau meminimalkan kewajiban perpajakannya dengan mengikuti aturan undang-undang, penghindaran pajak tidak termasuk dalam kategori ketidakpatuhan terhadap undang-undang perpajakan (T.Kurniasih & Maria M. Ratna Sari, 2013). Akibatnya, penghindaran pajak, menjadi tindakan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak ketika undang-undang tersebut mengandung celah atau kelemahan yang memungkinkan mereka untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Sandy & Lukviarman, 2015).

Justice Reddy pada kasus McDowell & Co Vs CTO AS, menggambarkan penghindaran pajak sebagai kemampuan untuk menghindari pajak sambil mematuhi hukum. Penggelapan pajak, menurut OECD, adalah upaya WP untuk mengurangi berapa kewajiban yang harus dibayar, meskipun upaya ini tidak bertentangan dengan hukum (menurut surat undang-undang), melainkan bertentangan dengan tujuan. pembentukan undang-undang terlebih dahulu. penghindaran pajak

2.1.3. Good Corporate Governance (GCG)

Sederhananya, ini adalah sistem untuk mengawasi dan mengendalikan bisnis untuk memenuhi tujuan tertentu. Keputusan Menteri KEP-117/M-MBU/2002 menetapkan Penerapan Tata Kelola pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), suatu siklus dan desain yang digunakan oleh BUMN untuk meningkatkan kualitas bisnis, tanggung jawab perusahaan dalam mengejar nilai pemegang saham yang berkelanjutan dengan tetap melindungi kepentingan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan regulasi dan moral.

Pedoman dasar dari GCG pada dasarnya mempunyai tujuan untuk membentuk perkembangan kinerja perusahaan (Abigail, 2020). Penerapan sistem kelola perusahaan yang tinggi dapat meminimalisir aktifitas manipulasi performa yang berdampak pada laporan keuangan tidak megambarkan nilai real perusahaan.

Prinsip *good corporate governance* yang dikembangkan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) adalah sebagai berikut:

1. **Responsibilitas**

Untuk memastikan kelangsungan bisnis jangka panjang, organisasi harus mematuhi pasal yang berlaku, serta memenuhi kewajiban mereka kepada masyarakat, lingkungan, dan karyawan mereka.

2. **Kewajaran dan kesetaraan**

Jika hak-hak pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya ingin dilindungi, kepentingan mereka harus ditempatkan di garis depan..

3. **Independensi**

Keputusan tentang masa depan perusahaan dan hak-hak pemegang sahamnya harus dibuat secara independen, tanpa pengaruh pihak luar.

4. **Transaparasi (*Transparency*)**

Untuk pelaporan yang lengkap dan benar dari semua peristiwa berkaitan perusahaan. Setiap informasi harus dikompilasi dan ditampilkan dengan sangat hati-hati.

5. **.,Akuntabilitas**

Calk perusahaan harus tersedia untuk publik secara jelas dan jujur. Penting juga untuk menjalankan bisnis dengan cara yang melayani pemegang saham

dan pemangku kepentingan lainnya sambil tetap mengutamakan kebutuhan bisnis.

2.1.3.1. Kepemilikan Institusional

Menurut Pirzada et al., (2015). Kepemilikan suatu lembaga dalam suatu perusahaan diukur dengan persentase sahamnya yang menjadi hak oleh lembaga keuangan lain, seperti reksa dana, pialang saham, perusahaan asuransi, dan dana pensiun. Aktivitas suatu perusahaan dipengaruhi oleh kepemilikan institusionalnya, yang berperan dalam mengawasi manajer perusahaan. Pemegang saham institusi menyediakan produktivitas maksimum manajer yang merupakan sumber kekuatan yang tersedia untuk mempertahankan performa manajer (Wardani et al., 2017).

Menurut (Shierly & Liana, 2017) Akruar sesuai dengan kepentingan manajemen dimungkinkan dan dapat dipengaruhi oleh persentase saham yang dimiliki oleh institusi pada saat laporan keuangan disusun. Memiliki banyak investor institusional di perusahaan dapat membantu menjaga manajemen dari membuat keputusan berdasarkan keuntungan pribadi mereka sendiri.

2.1.3.2. Dewan komisaris independen

Mereka yang menjabat sebagai komisaris independent tidak memiliki hubungan dengan manajemen perusahaan. Komisaris independen biasanya mencapai 30% dari total jumlah komisaris di perusahaan. Persentase komisaris independen dari luar perusahaan digunakan untuk mengukur komisaris independen (Rimardhani et al., 2016). Suatu permasalahan dalam *good corporate governance* apabila selektif otoritas yang paling penting memiliki kekuatan lebih

tinggi dibandingkan dengan dewan komisaris, sedangkan fungsi dari dewan komisaris, adalah mengawasi direksi yang di pimpin oleh owner organisasi tersebut.

2.1.3.3. Komite Audit

Menurut Fenny, 2014 Anggota dewan memilih komite audit yang bertugas mengawasi pelaporan keuangan perusahaan dan prosedur pengungkapan. Persepsi investor terhadap kinerja keuangan perusahaan dipengaruhi oleh kerja komite audit, yang merupakan persyaratan dalam Tata Kelola Perusahaan. Dengan tugas tersebut, komite audit bertanggung jawab untuk:

1. Laporan Keuangan

Tanggung jawab komite audit dalam laporan keuangan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen berdasarkan keadaan yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil, serta rencana jangka panjang suatu perusahaan.

2. Tata kelola perusahaan

Untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, komite audit bertugas mengawasi operasional perusahaan.

3. Pengawasan perusahaan

Selain mengawasi perusahaan, komite audit bertugas mengawasi potensi risiko, sistem pengendalian internal, dan pekerjaan pengawasan auditor internal.

2.1.4. Profitabilitas

Profitabilitas suatu perusahaan dapat diukur dengan seberapa cepat ia mampu menghasilkan keuntungan. Kombinasi likuiditas, manajemen aset, dan hutang usaha tercermin dalam rasio profitabilitas (Rizal Ardiansyah, 2017). Selain mengukur dan menghitung laba perusahaan untuk perbandingan dengan tahun sebelumnya, profitabilitas juga berfungsi untuk menghitung laba setelah pajak dan mengevaluasi pengembalian investasi untuk semua uang perusahaan yang dikeluarkan.

Dalam analisis ini, profitabilitas ditentukan dengan menggunakan *return on equity* (ROE), yang merupakan ukuran laba setelah pajak dibandingkan dengan modal yang diinvestasikan. Jika sebuah perusahaan memiliki *Return on Equity* yang tinggi, itu berarti perusahaan tersebut memanfaatkan modalnya dengan baik. Profitabilitas dari perspektif pemegang saham dapat diukur dengan pengembalian ekuitas perusahaan, yang merupakan alat umum yang digunakan oleh investor ketika membuat keputusan investasi Kasmir, (2014).

2.2. Penelitian Terdahulu

Dengan menggunakan sejumlah penelitian sebelumnya sebagai sumber inspirasi, termasuk oleh Farida Nuraina, (2019) yang melihat bagaimana pendapatan, likuiditas, dan tata kelola perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak tanpa adanya efek dari kepemilikan institusional (fokus penelitian komite audit).

Penelitian dari Meila Sari & Heidi Paramitha Devi, (2018) tentang pengaruh CGC dan profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak.

Penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen, dan profitabilitas semuanya berperan dalam menghindari pajak di Indonesia, tetapi baik komite audit maupun kualitas audit tidak berperan.

Penelitian dari, Wijayanti et al., (2018) tentang pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* Temuan dari research ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional komite audit dan kualitas audit keduanya berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan komisaris independen yang juga merupakan proksi dari tata kelola perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya dari Ayu Praditasari N, K & Setiawan, P E, (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kehadiran komite audit, dan ukuran perusahaan semuanya terkait dengan penghindaran pajak yang lebih sedikit, sementara *leverage*, profitabilitas, dan kehadiran komisaris independen semuanya terkait dengan penghindaran pajak yang lebih banyak.

Selanjutnya Penelitian dari Rahmawati et al., (2015) tentang Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. Temuan studi menunjukkan bahwa berbagi data CSR dengan publik dapat membantu dalam penghindaran pajak. Terdapat dampak negatif dari kepemilikan manajerial dan institusional, dampak positif dari komite audit, dan dampak negatif kecil dari kualitas audit terhadap penghindaran pajak.

Berikutnya penelitian dari I Gusti Ayu C. M., & K. A. Suardana (2014). tentang pengaruh cgc (tata kelola), profitabilitas dan karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance*. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap

penghindaran pajak adalah nol, sedangkan independensi dewan komisaris adalah variabel. Sifat eksekutif adalah prediktor yang dapat diandalkan untuk keberhasilan penghindaran pajak. Berikut Ringkasan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Farida Nuraina (2019)	pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan <i>good corporate governance</i> terhadap penghindaran pajak	Penelitian ini menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh
2	(Meila Sari & Heidy Paramitha Devi, 2018)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan profitabilitas tetapi tidak terkait dengan keanggotaan komite audit atau kualitas audit
3	(Wijayanti et al., 2018)	Pengaruh <i>corporate governance</i> terhadap <i>tax avoidance</i>	Penelitian ini menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit semuanya berpengaruh positif dan signifikan
4	Ayu Praditasari, N K & Setiawan, P E, (2017)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas Pada <i>Tax Avoidance</i>	Menurut temuan penelitian, kepemilikan institusional, keanggotaan komite audit, dan ukuran perusahaan semuanya memiliki dampak negatif terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa profitabilitas dan leverage keduanya memiliki dampak positif, sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh.
5	(Rahmawati et al., 2015)	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR secara signifikan mengurangi penghindaran pajak. Terdapat pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena kepemilikan manajerial dan institusional, pengaruh positif karena komite audit, dan pengaruh negatif dapat diabaikan karena kualitas audit yang buruk.

Disambung ke halaman selanjutnya

2.1. Tabel Sambungan

No	Nama, Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
6	I Gusti Ayu C. M., & K.A. Suardana (2014)	Pengaruh <i>GCG</i> , Profitabilitas, dan karakteristik Eksekutif terhadap Tax Avoidance	Studinya menemukan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh keberadaan pemilik institusional, kualitas audit, atau profitabilitas komite audit. Sementara itu, ada korelasi positif antara penghindaran pajak dan sifat eksekutif.

Sumber: review dari beberapa jurnal ilmiah

2.3. Kerangka Konsep Penelitian

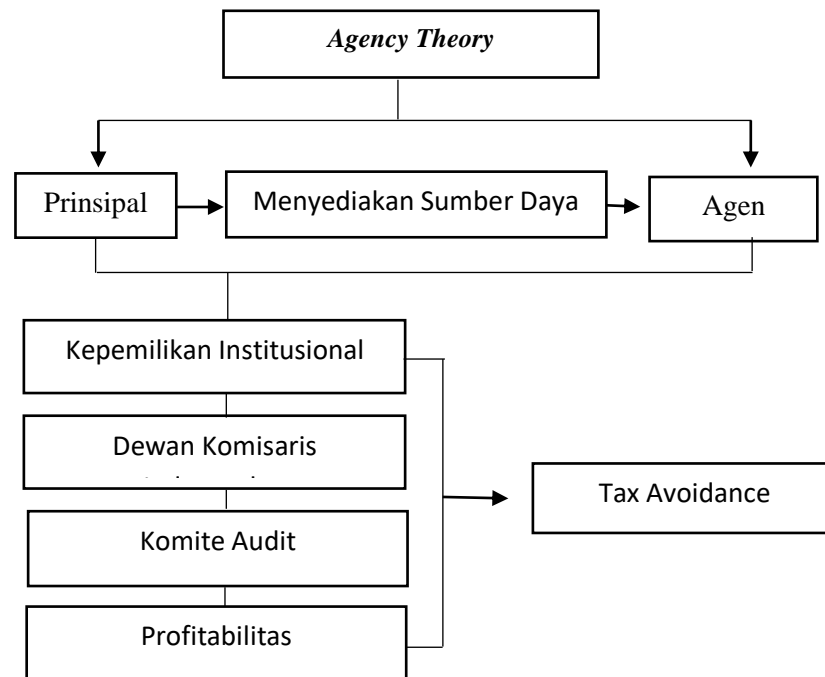
Menurut teori keagenan, pemilik bisnis harus mendelegasikan tanggung jawab manajemen kepada para ahli terlatih, yang juga dikenal sebagai agen. Tujuan memisahkan manajemen dan pemilik adalah untuk memastikan bahwa pemilik bisnis mendapatkan keuntungan paling banyak dengan biaya yang paling efektif. Pemilik bisnis mempekerjakan agen untuk melakukan pekerjaan atas nama mereka, termasuk membuat keputusan

Teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia diantaranya adalah sifat yang mementingkan diri sendiri (*self interest*), daya pemikiran yang terbatas tentang persepsi kedepannya (*bounded rationality*), dan sikap yang selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan sifat dasar tersebut dapat di simpulkan bahwa manajer bisa saja bersifat opportunistik, yaitu mengutamakan kepentingan pribadi dalam hal ini tentu akan berdampak pada tata kelola perusahaan.

Salah satu keterkaitan antara penelitian ini dengan teori keagenan adalah praktik penghindaran pajak dan tata kelola perusahaan. Munculnya konflik kepentingan yang diawali dengan asimetri informasi akan terjadi jika suatu

perusahaan tidak memiliki tata kelola yang baik. Adanya konflik antara keuntungan perusahaan dengan kepentingan pemungut pajak (fiskus) (pengelola pajak). Apabila suatu perusahaan mempunyai tata kelola yang baik maka nilai suatu perusahaan semakin tinggi, dan apabila suatu perusahaan bernilai tinggi tentunya akan membuat performa baik bagi perusahaan tersebut, performa yang baik tentu akan menarik minat calon investor.

Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian

Sumber: dikembangkan dalam skripsi.

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan teori agensi (*Agency Theory*) investor institusi cenderung mengawasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi tujuan keuangannya jika

mayoritas pemegang sahamnya adalah perusahaan atau lembaga pemerintah. Maka hal tersebut mendorong manajemen untuk meminimalkan beban pajak yang terutang oleh perusahaan (Wijayanti et al., 2018). Karena perannya sebagai pengawas dan pengatur pengelolaan pajak, kepemilikan institusional mengambil bagian penting dalam administrasi perusahaan yang baik. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari pihak institusi kepada agen dengan fungsi dan tujuan agen tidak bertindak dengan kepentingan pribadi yang dapat merugikan pihak investor sehingga manajemen pajak teratur tanpa harus melakukan praktik penghindaran pajak yang berlebihan.

Menurut penelitian terdahulu, Wijayanti et al., (2018) mengenai pengaruh *good corporate governance*, dengan proksi kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu dapat di ajukan hiotesis sebagai berikut:

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*

2.4.2. Pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*

Ketika ada lebih banyak komisaris independen di sebuah perusahaan, lebih mudah untuk mengawasi keputusan oportunistik manajer, menurut teori agensi manajemen (Jensen & Meckling, 1976).

Menjaga nilai perusahaan dengan tata kelola yang baik dengan memiliki dewan komisaris independen yang tidak terafiliasi dengan kepentingan politik atau ekonomi. Namun dalam hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ayu Praditasari N, K & Setiawan, P E, (2017) Membuktikan bahwa dewan komisaris

independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian lain yang dilakukan oleh I Gusti Ayu & Suardana, (2014) karena dewan komisaris independen yang mendorong penghindaran pajak merugikan. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis berikut diajukan untuk diselidiki:

H2: Dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*

2.4.3. Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*

Salah satu cara teori keagenan terhubung ke komite audit, adalah melalui peran komite dalam melihat masalah keagenan yang muncul ketika manajemen dan pemilik perusahaan memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda. Fenny, (2014) mengidentifikasi anggota komite audit yang dipilih oleh dewan komisaris untuk mengawasi pelaporan dan pengungkapan keuangan. Selanjutnya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris yang bertanggung jawab menjalankan tugas direksi dalam menjalankan perusahaan, sesuai keputusan Bursa Efek Indonesia No.Kep-315/BEJ/06/2000. Paling tidak, salah satu anggota komite harus mengetahui akuntansi keuangan.

Komite audit bertanggung jawab atas setiap laporan keuangan yang dapat mempengaruhi bagaimana investor melihat kualitas pendapatan perusahaan, maka komite tersebut memegang peranan paling penting dalam elemen tata kelola.

Hasil penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Wijayanti et al., (2018) bahwa komite audit secara signifikan mengurangi penghindaran pajak menjadi lebih baik. Terlepas dari temuan studi oleh Melia Sari & Heidy Paramitha Devi,

(2018) Berdasarkan ketidaksesuaian antar penelitian, maka dapat dihipotesiskan bahwa variabel ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak:

H3: Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*

2.4.4. Pengaruh Profitabilitas terhadap *tax avoidance*

Menurut teori keagenan, ada tiga jenis teori keagenan: sifat manusia, asumsi organisasi, dan asimetri informasi, selain pihak mediator yang independen sebagai penengah antara manajemen dan prinsipal. Karena profitabilitas adalah ukuran kualitas perusahaan, auditor pihak ketiga harus memastikan bahwa manajemen telah menepati janji mereka untuk meningkatkan keahlian, perusahaan dalam menghasilkan laba.

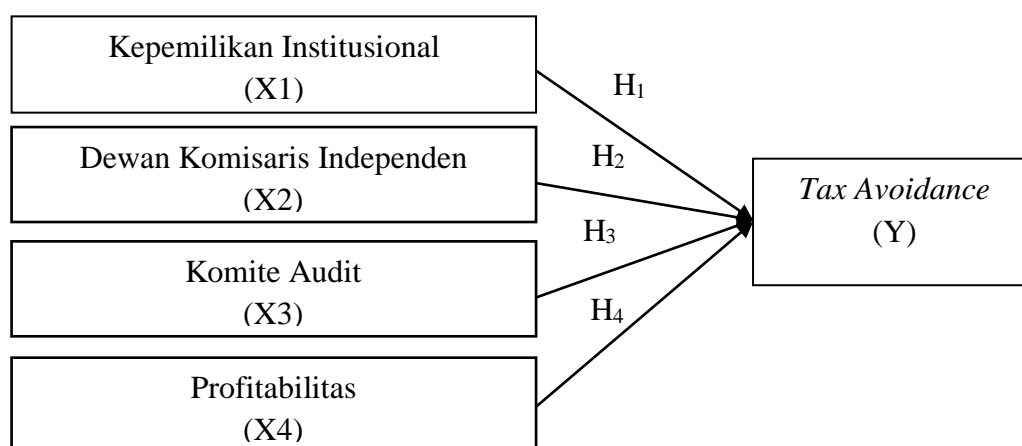
Rasio ini digunakan sebagai metrik profitabilitas untuk analisis ini (ROE). Rasio laba bersih setelah pajak, terhadap total ekuitas adalah metrik populer yang digunakan oleh investor untuk mengevaluasi profitabilitas perusahaan Kasmir, (2014)

Bisnis yang menguntungkan, dengan kata lain, cenderung tidak terlibat dalam strategi penghindaran pajak. Penghindaran pajak, di sisi lain, dimungkinkan karena profitabilitas perusahaan berfungsi sebagai indikator pencapaian laba yang tinggi atau rendah, yang menjadi laba perusahaan untuk tujuan pajak.

Menurut penelitian terdahulu oleh Meila Sari & Heidy Paramitha Devi, (2018) bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh profitabilitas. Sementara penelitian lain I Gusti Ayu C. M., & K. A. Suardana (2014) dengan hasil profitabilitas, berpengaruh negatif praktik penghindaran pajak. Temuan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut, dengan uraian ini:

H4: profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance***2.5. Model Penelitian**

Kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan profitabilitas penghindaran pajak adalah beberapa fenomena yang menginspirasi model penelitian ini. Model penelitian ditunjukkan pada Gambar 2.2, yang dapat ditemukan di bagian berikut:

**Gambar 2.1 Model Penelitian**

Sumber: dikembangkan dalam skripsi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat (*Dependent Variable*) dalam penelitian ini, penghindaran pajak, ialah upaya perusahaan untuk meminimumkan hutang pajak yang dibayarkan atau terhutang oleh perusahaan tanpa melanggar undang-undang. Hampir seluruh perusahaan di Indonesia yang masih melakukan penghindaran pajak, namun ada juga sebagian perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian ini menggunakan ukuran penghindaran pajak *effective tax rate (ETR)* seperti penelitian yang dilakukan oleh Sandy, S & M, Lukviarman, (2015) dengan membandingkan beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak yang didapatkan melalui laporan laba rugi perusahaan.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3.1.2. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan saham oleh organisasi selain investor individu, seperti bank, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Semakin besar persentase kepemilikan institusional, semakin efektif

pengawasan perusahaan. Dengan standar yang sama seperti penelitian sebelumnya Uun Sunarsih & Refany Oktavia, A (2017) yang dihitung dengan cara membagi persentase saham yang dimiliki oleh lembaga tersebut dengan jumlah seluruh saham yang beredar sebagaimana dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan:

$$KI = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Institusi}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

2. Dewan komisaris independen

Dalam laporan tahunan perusahaan dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen maupun anggota dewan komisaris lainnya, yang akan mempengaruhi kinerjanya dalam kepentingan dan tujuan perusahaan. Dalam penelitian ini dewan komisaris independen yang sebelumnya digunakan oleh Rahmawati et al., (2015) diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$KoIn = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

3. Komite Audit

Komite audit adalah bagian dari GCG selain berfungsi sebagai penganggung jawab pengungkapan laporan keuangan karena fungsinya sebagai penanggung jawab peran komite audit juga sebagai pengawas dalam tata kelola perusahaan serta diharapkan bisa memberikan pandangan mengenai permasalahan dalam kebijakan keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini

komite audit di ukur dengan ukuran yang di digunakan Wijayanti et al., (2018) menggunakan jumlah komite audit dalam perusahaan yang didapatkan melalui laporan tahunan perusahaan pengukuran yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{KoA} = \text{Jumlah Komite Audit perusahaan}$$

4. ,Profitabilitas

Ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan selama jangka waktu tertentu dikenal sebagai ukuran profitabilitas. Profitabilitas dianalisis dalam hal *return on equity* dalam penelitian ini (ROE). menurut Kasmir, (2014) untuk mencari *return on equity* yaitu, gunakan rumus ini, atau tinjau laporan keuangan perusahaan untuk melihat bagaimana laba bersihnya dibandingkan dengan modalnya:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba bersih Setelah pajak (EAT)}}{\text{Modal}}$$

3.2. Jenis dan Sumber Data

Penulis mengandalkan data kuantitatif yang diperoleh dari sumber sekunder untuk analisis ini. Sedangkan data sekunder mengacu pada informasi yang telah dikumpulkan dan disusun secara tidak langsung, seperti melalui penggunaan publikasi perusahaan atau arsip dan dokumen internal perusahaan. Data dokumentasi yang dimaksud bisa berupa surat-surat, laporan tahunan maupun laporan keuangan. Penulis menggunakan data sekunder, didapat dalam situs resmi Bursa Efek Indonesia. www.idx.co.id, termasuk pembukuan tahunan dan laporan

keuangan perusahaan di sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar tahun 2015-2020. selain kehadiran online perusahaan.

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian

Penulis mengambil sampel 63 perusahaan yang aktif di industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2015 hingga 2020 untuk dianalisis. Untuk penelitian ini, kami mengambil sampel yang representatif dari 19 perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada industri dasar dan kimia dari tahun 2015 hingga 2020. (Lampiran 1). Penelitian menggunakan 114 sampel yang ditentukan berdasarkan jumlah lampiran.

Purposive sampling digunakan untuk memilih sampel untuk penelitian ini; yaitu, sampel dipilih dengan menggunakan seperangkat kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Berikut ini adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika memilih peserta untuk sampel penelitian ini:

1. Perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI selama periode penelitian yaitu periode tahun 2015-2020
2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama periode penelitian yaitu periode 2015-2020
3. Perusahaan yang laporan keuangannya disajikan dalam mata uang rupiah (Rp) secara penuh selama periode 2015-2020
4. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode penelitian dan memiliki struktur GCG yang lengkap yaitu periode 2015-2020

Tabel 3.1 Kriteria pemilihan sampel

No.	Keterangan	Total
1	Perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI selama periode penelitian yaitu periode tahun 2015-2020	63
2	Perusahaan yang tidak mempublikasi laporan keuangan tahunan selama periode 2015-2020	(3)
3	Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan tahunan dalam mata uang rupiah (Rp) secara penuh selama periode 2015-2020	(17)
4	Perusahaan yang mengalami kerugian dan tidak memiliki struktur GCG yang lengkap selama periode 2015-2020	(24)
Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel Penelitian		19
Jumlah perusahaan sampel dalam periode penelitian (19 perusahaan x 6 tahun)		114

Sumber: Data diolah, 2022

3.4. Metode Pengumpulan Data

Karena sifat data yang dikumpulkan (sekunder), pendekatan dokumentasi digunakan untuk menyusunnya. Ini melibatkan pemeriksaan sumber utama yang relevan seperti karya ilmiah, buku, jurnal, artikel, dan situs web. Variabel dependen dan independen serta metode dokumentasi penelitian ini selama periode 2015-2020 berasal dari laporan keuangan dan laporan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan di sektor industri dasar dan kimia di BEI.

Membaca berbagai macam buku, majalah, dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian juga merupakan bagian integral dari penyelidikan ini.

3.5. Metode Analisis Data

Pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan profitabilitas dianalisis di sini dengan menggunakan pendekatan analisis data regresi linier berganda. Seratus empat belas (114) sampel bisnis yang representatif digunakan untuk mengumpulkan data. Model ini dipilih karena dapat menjelaskan beberapa variabel sekaligus dan oleh karena itu dapat diterapkan pada penyelidikan saat ini. Selain itu, metode statistik digunakan untuk menganalisis data, dan Paket Statistik untuk Ilmu Sosial 23 (SPSS 23).

3.5.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah jenis analisis data di mana data itu sendiri dijelaskan daripada kesimpulan luas atau generalisasi yang ditarik dari data (Sugiyono, 2017).

3.5.2. Uji asumsi klasik

Untuk memperjelas bahwa analisis digunakan tanpa masalah, yang terbaik adalah mengesampingkan masalah dengan terlebih dahulu memverifikasi bahwa asumsi klasik benar. Penelitian ini menggunakan serangkaian uji asumsi klasik, yang meliputi pemeriksaan normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

3.5.2.1. Uji normalitas

Untuk mengetahui apakah data untuk variabel bebas dan variabel terikat dalam model regresi berdistribusi normal, maka dilakukan uji normalitas. Memiliki distribusi normal atau yang secara statistik mendekati normal merupakan indikasi model regresi yang baik. Uji *Kolmogorov-Smirnov* akan

dijalankan untuk menentukan tingkat signifikansi dan dengan demikian apakah data terdistribusi normal atau tidak. Pendeteksian normal apabila nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* $> 0,05$.

3.5.2.2. Uji Multikolinearitas

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk melihat apakah variabel-variabel independen dalam model regresi saling berkorelasi. Variabel bebas dalam model yang baik tidak boleh dikorelasikan satu sama lain. Pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada matriks korelasi variabel independen. Dengan menampilkan nilai Tolerance and *Variance Inflation Factor* (VIF) dalam matriks korelasi, multikolinearitas diindikasikan ketika ada korelasi yang tinggi antara variabel independen (biasanya di atas 0,90) (Ghozali, 2016) Apabila nilai VIF ≥ 10 dan nilai tolerance $\leq 0,1$ menggambarkan bahwa model regresi mengalami multikolinearitas dan begitu juga sebaliknya, jika nilai VIF ≤ 10 dan nilai tolerance $\geq 0,1$ maka model regresi terbebas dari multikolinearitas.

3.5.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui, apakah residual atau pengamatan dalam suatu model regresi linier memiliki variansi yang berbeda dengan pengamatan lainnya. Homoskedastisitas mengacu pada situasi di mana variasi dalam standar deviasi antara pengamatan individu adalah seragam (I Ghozali, 2016). Bagaimanapun, grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dapat diperiksa untuk ada tidaknya homoskedastisitas. Tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang terlihat dan titik-titik data tersebar merata di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

3.5.2.4. Uji Autokorelasi

Tujuan dari uji autokorelasi adalah untuk mengetahui apakah error pada periode $t-1$ dari model regresi linier berkorelasi satu sama lain. Autokorelasi terjadi setiap kali dua variabel berkorelasi. Autokorelasi muncul ketika ada hubungan antara pengamatan berturut-turut yang dilakukan pada waktu yang berbeda dalam setahun; idealnya, model tidak akan menunjukkan fenomena ini (I Ghozali, 2016). Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi autokorelasi sebagai berikut:

1. Uji Durbin-Watson; dasar pengambilan keputusannya yaitu angka DW diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif, angka DW diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi, dan angka DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
2. Run test; jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Apabila nilai Asymp.Sig (2-tailed) lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 maka akan di simpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi.

3.5.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berusaha untuk memperkirakan dan memprediksi rata-rata atau nilai rata-rata dari variabel dependen populasi yang diberikan nilai dari satu atau lebih variabel independen.

Sebuah model berdasarkan persamaan regresi dikembangkan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y	: Penghindaran Pajak
X1	: Kepemilikan Institusional
X2	: Komisaris Independen
X3	: Komite Audit
X4	: Profitabilitas
α	: Konstanta
$\beta_1 - \beta_4$: Koefisien regresi variabel independen
e	: error

3.5.4. Uji Hipotesis

3.5.4.1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi, atau R^2 , adalah nilai numerik antara 0 dan 1 yang menunjukkan seberapa baik model menjelaskan varians dalam variabel dependen. Banyak peneliti menyarankan menggunakan nilai *Adjusted* R^2 untuk menentukan model regresi mana yang terbaik karena R^2 harus meningkat untuk setiap tambahan variabel independen terlepas dari apakah variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Kedekatan dengan 1 (nilai R^2 tinggi) menunjukkan bahwa sebagian besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen (Ghozali, 2016).

3.5.4.2. Uji Simultan (Uji F)

Menggunakan uji F untuk menguji hipotesis nol bahwa b_1 , b_2 , dan b_3 semuanya sama dengan nol. Item berikut akan digunakan sebagai kriteria untuk tes:

- a. Jika nilai signifikan, uji $F > 0,05$, jari tidak terdapat pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.
- b. Nilai signifikan uji $F < 0,05$, maka terdapat pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

3.5.4.3. Pengujian secara parsial (uji t)

Tujuan pengujian hipotesis adalah untuk melihat apakah fakta yang dikumpulkan dan dianalisis mendukung jawaban teoritis yang terkandung dalam pernyataan hipotesis. Uji-t digunakan untuk menilai signifikansi variabel independen atau penjelas dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hipotesis diterima jika nilai signifikansi t lebih kecil dari $0,05$, menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik antara variabel bebas dan variabel terikat. Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam pengujian ini adalah 95% . Jika nilai t lebih besar $0,05$, hipotesis nol diterima; sebaliknya, hipotesis ditolak, yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel independen dan dependen (Ghozali, 2016).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) di sektor industri dasar dan kimia antara 2015 dan 2020 merupakan populasi yang digunakan. Peneliti menggunakan *purposive sampling* untuk mendapatkan 114 sampel data berdasarkan kriteria yang tercantum di bawah ini. 114 sampel ini diperoleh dari 63 perusahaan yang terdaftar dan terpilih dalam kriteria.

Tabel 4.1. Kriteria Pemilihan Sampel

NO	Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah
1	Perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI selama periode Penelitian yaitu 2015-2020	63
2	Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan dan tahunan selama periode penelitian 2015-2020	(3)
3	Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan tahunan dalam mata uang rupiah (Rp) secara penuh selama metode penelitian 2015-2020	(17)
4	Perusahaan yang mengalami kerugian dan tidak memiliki struktur GCG yang lengkap selama periode penelitian 2015-2020	(24)
	Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel penelitian	19
	Jumlah sampel penelitian awal (19 perusahaan x 6 tahun)	114
	Data outlier	(44)
	Jumlah akhir sampel penelitian setelah dilakukan outlier	70

Sumber: Data Diolah, 2022

4.2. Analisis Data

4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif

Nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai rata-rata merupakan contoh ukuran tendensi sentral yang dapat diturunkan dari suatu kumpulan data dengan menggunakan statistik deskriptif (*mean*). selain signifikansi varians dalam kepemilikan institusional, independensi dewan direksi, keberadaan komite audit, kinerja keuangan, dan penghindaran pajak. Informasi berikut dikumpulkan apa adanya, tanpa menarik kesimpulan atau asumsi yang luas.

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan Institusional (KI)	70	,112	,997	,62487	,251016
Komisaris Independen (KoIn)	70	,250	,600	,41289	,091084
Komite Audit (KOA)	70	3	4	3,03	,168
Profitabilitas (ROE)	70	,014	,250	,09571	,062282
Tax Avoidance (ETR)	70	,139	,354	,24900	,044695
Valid N (listwise)	70				

Sumber: Data Diolah, 2022 (Hasil Output IBM SPSS versi 23)

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas hasil dari statistik deskriptif dari 70 data perusahaan sektor industri dasar dan kimia tahun 2015 sampai dengan 2020 untuk variabel dependen *Tax Avoidance* (Y) dan variabel independen meliputi Kepemilikan Institusional (X_1), Dewan Komisaris Independen (X_2), Komite Audit (X_3) dan Profitabilitas (X_4) maka penelitian ini menunjukkan hal sebagai berikut:

1. *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen yang di proksikan dengan ETR dengan nilai minimum 0,139 dan nilai maksimum sebesar 0,345 sedangkan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,24900 serta nilai standar deviasi sebesar

0,044695 yang berarti variabel *tax avoidance* berfluktuasi karena terdapat selisih cukup besar antara nilai minimum dan maksimum. Selain itu hal ini juga mengindikasikan bahwa variabel *tax avoidance* berdistribusi normal jika dilihat dari nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*).

2. Kepemilikan institusional sebagai variabel independen yang di proksikan dengan kepemilikan saham oleh pihak institusional yang dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nilai minimum dari variabel kepemilikan institusional adalah 0,112 dan nilai maksimum sebesar 0,997 pada nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,62487. Serta nilai standar deviasi sebesar 0,251016 jika dilihat dari standar deviasi dan nilai rata-rata tersebut maka variabel, kepemilikan institusional sangat berfluktuasi karena selisih antara nilai minimum dan maksimum yang cukup besar. Dapat menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional berdistribusi normal dilihat dari nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata.
3. Komisaris independen sebagai variabel independen yang di proksikan dengan jumlah komisaris independen yang dibagi dengan jumlah komisaris perusahaan lalu dikali dengan 100%. Nilai minimum sebesar 0,250 dan nilai maksimum sebesar 0,997 sedangkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,41289 serta standar deviasi sebesar 0,091084. Jika dilihat dari selisih nilai minimum dan maksimum yang relatif cukup besar maka variabel komisaris independen sangat berfluktuasi. Hal ini juga mengindikasikan bahwa data berdistribusi normal karena nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata.

4. Ukuran komite audit perusahaan dapat diambil sebagai proksi Komite Audit sebagai variabel independen. Rentangnya dari 3 hingga 4, dengan rata-rata (rata-rata) 3,03 dan standar deviasi (stdev) 0,168. Variabel komite audit menunjukkan variasi substansial karena kesenjangan yang lebar antara nilai minimum dan maksimumnya. Karena standar deviasi variabel komite audit lebih kecil dari *mean*, kita dapat menyimpulkan bahwa variabel tersebut mengikuti distribusi normal (*mean*).
5. Profitabilitas bisnis dihitung sebagai laba setelah pajak dibagi dengan total ekuitas bisnis, kemudian dikalikan 100%. Nilai berkisar dari 0,014 hingga 0,250, inklusif. Rata-rata 0,09571 dan standar deviasi 0,062282 mengkarakterisasi data. Karena spread yang besar antara nilai minimum dan maksimumnya, jelas bahwa variabel profitabilitas sangat tidak dapat diprediksi. Karena standar deviasi variabel profitabilitas lebih kecil dari mean, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut mengikuti distribusi normal (*mean*).

4.2.2. Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan serangkaian uji asumsi klasik, seperti normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, untuk memastikan tidak ada masalah yang muncul dari penyimpangan asumsi klasik yang biasanya digunakan dalam analisis tersebut.

4.2.2.1. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji normalitas terhadap residual menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov* dengan menggunakan 114 sampel perusahaan awal sebelum

dilakukan outlier pada beberapa sampel perusahaan yang tidak berdistribusi normal. Model regresi dapat terpenuhi jika nilai signifikansi $> 0,05$.

**Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas 1
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,24160128
Most Extreme Differences	Absolute	,258
	Positive	,258
	Negative	-,160
Test Statistic		,258
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c

Sumber: Data Diolah, 2022 (Hasil Output IBM SPSS versi 23)

Berdasarkan hasil dari uji normalitas yang telah dilakukan nilai dari Asymp. Sig menunjukan nilai 0,000 apabila dilihat nilai tersebut memiliki nilai yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti data tersebut tidak berdistribusi secara normal sehingga dilakukan *outlier* pada beberapa sampel.

Outlier ialah data yang berbeda secara signifikan dari pengamatan lain dan muncul sebagai nilai ekstrim untuk satu variabel atau kombinasi (Ghozali, 2016).

Tabel 4.4 Uji Normalitas 2 Setelah Outlier

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,04009344
Most Extreme Differences	Absolute	,090
	Positive	,065
	Negative	-,090
Test Statistic		,090
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Data Diolah, 2022 (Hasil Output IBM SPSS versi 23)

Dalam penelitian ini, $n = 70$ sampel digunakan setelah outlier dilakukan pada total 44 perusahaan yang berbeda (Lihat lampiran 2). Data telah terdistribusi secara normal, seperti yang ditunjukkan oleh Asym. Nilai sig sebesar 0,200 yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 sehingga cocok untuk pengujian model regresi berganda.

4.2.2.2. Uji Multikolinieritas

Pemeriksaan matriks korelasi antara variabel penjelas mengungkapkan strategi untuk mendeteksi multikolinieritas. *Tolerance and Variance Inflation Factor* yang tinggi dalam matriks korelasi menunjukkan multikolinieritas ketika ada korelasi yang tinggi antara variabel independen (biasanya lebih besar dari 0,90) (Ghozali, 2016) Apabila nilai $VIF \geq 10$ dan nilai $tolerance \leq 0,1$ menggambarkan bahwa model regresi mengalami multikolinieritas dan begitu juga sebaliknya, jika nilai $VIF \leq 10$ dan nilai $tolerance \geq 0,1$ maka model regresi terbebas dari multikolinieritas.

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas.

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
	Kepemilikan Institusional (KI)	,938	1,066
	Komisaris Independen (KoIn)	,946	1,057
	Komite Audit (KOA)	,907	1,102
	Profitabilitas (ROE)	,876	1,142

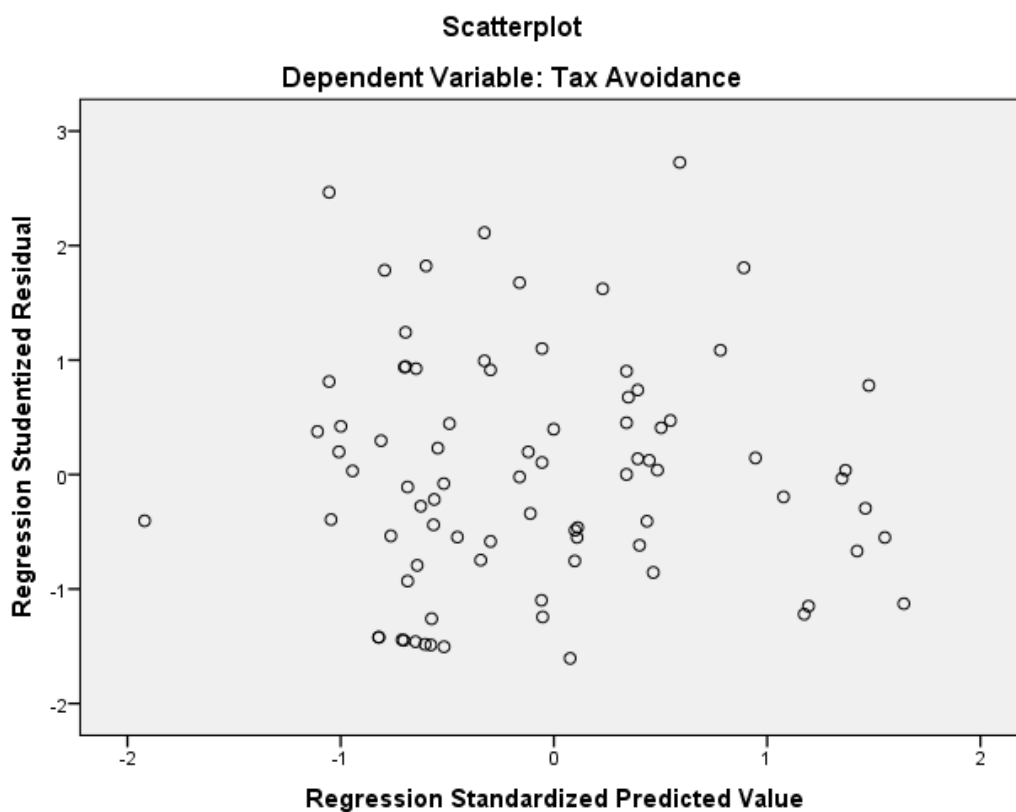
Sumber: Data Diolah, 2022 (Hasil Output IBM SPSS versi 23)

Tidak terdapat multikolinieritas antar variabel tersebut karena nilai Tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Nilai ini menunjukkan

variabel komite audit memiliki toleransi sebesar 0,907 yang lebih besar dari 0,1, dan VIF sebesar 1,102 yang kurang dari 10, serta toleransi variabel komisaris independen sebesar 0,946 yang lebih besar dari 0,1, dan VIF sebesar 1,057 yang kurang dari 10.

4.2.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menentukan apakah residual atau pengamatan dalam model regresi linier memiliki jumlah varian yang tidak sama satu sama lain.



Gambar 4.1. Hasil dari uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data Diolah, 2022 (Hasil Output IBM SPSS versi 23)

Scatterplot di atas menunjukkan bahwa titik-titik data tidak mengelompok di bawah atau di atas nilai 0, dan tersebar merata di atas dan di bawah atau di

sekitar 0. Karena titik-titik tersebut tidak mengelompok di bawah atau di atas saja, maka tidak ada masalah heteroskedastisitas.

4.2.2.4. Uji Autokolerasi

Tujuan uji autokorelasi dalam penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis bahwa kesalahan periode $t-1$ dalam model regresi linier berkorelasi. Uji Durbin-Watson digunakan dalam model ringkasan penelitian ini, dan data dianggap bebas autokorelasi jika nilainya $du < dw < 4-du$. Pada tabel 4.6 di bawah ini, Anda akan menemukan hasil uji autokorelasi.

Tabel 4.6. Hasil Uji Autokolerasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,442 ^a	,195	,146	,041309	2,078

Sumber: Data Diolah, 2022 (Hasil Output IBM SPSS versi 23)

Berdasarkan hasil dari output SPSS diatas, diketahui nilai dari *Durbin-Watson* sebesar 2,078 nilai tersebut dapat dibandingkan dengan nilai dalam tabel *Durbin-Watson* pada signifikansi sebesar 0,05. Diketahui n merupakan jumlah sampel penelitian yang berjumlah 70 dan k merupakan jumlah variabel bebas dalam penelitian yaitu sebanyak 4 variabel. Selanjutnya nilai DW harus lebih besar dibandingkan d_U , angka tersebut dapat dilihat pada nilai tabel *Durbin-Watson* dan ditemukan nilai d_U sebesar 1,7351. Dari hasil tersebut maka nilai *Durbin-Watson* diantara batas (d_U) dan $(4-d_U)$ adalah $4 - 1,7351 = 2,2649$ hasil dari d_U 2,2649 lebih kecil dari 2,078 yang memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan bahwa autokorelasi tidak ada, dan dengan demikian melanjutkan dengan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis penelitian.

4.2.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi adalah studi tentang ketergantungan variabel terikat (terikat) dengan satu atau lebih variabel bebas, dengan tujuan untuk memperkirakan dan memprediksi mean populasi atau nilai rata-rata variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas yang diketahui (variabel penjelas atau independen).

Tabel 4.7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	,102	,100		1,019	,312
	Kepemilikan Institusional (KI)	,053	,020	,296	2,579	,012
	Komisaris Independen (Kolin)	,153	,056	,311	2,721	,008
	Komite Audit (KOA)	,022	,031	,082	,704	,484
	Profitabilitas (ROE)	-,157	,085	-,218	-1,837	,071

Sumber: Data Diolah, 2022 (Hasil Output IBM SPSS versi 23)

Dari tabel regresi linier berganda sebelumnya, kita dapat memperoleh rumus berikut:

$$Y = 0,102 + 0,053X_1 + 0,153X_2 + 0,022X_3 - 0,157X_4 + e$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai dari Konstanta (α) sebesar 0,102 yang berarti jika semua variabel independen sama dengan 0, maka nilai dari *Tax avoidance* senilai 0,102.
2. Nilai dari koefisien regresi dari kepemilikan institusional adalah 0,053 yang bernilai positif dari nilai tersebut dapat dinyatakan bahwa variabel dari

kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal tersebut juga mengindikasikan jika nilai koefisien regresi dari variabel lainnya tetap maka perubahan dari kepemilikan institusional (X_1) sebesar 1 persen akan menaikkan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebesar 0,053 atau 5,3 persen.

3. Variabel komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang ditentukan oleh nilai koefisien sebesar 0,153 yang bernilai positif. Nilai ini juga menunjukkan bahwa perubahan satu persen pada variabel komisaris independen (X_2) akan meningkatkan penghindaran pajak sebesar 0,153 atau 15,3 persen, dengan asumsi nilai koefisien regresi variabel lain tetap konstan.
4. Misalnya, jika nilai koefisien regresi semua variabel lainnya tetap sama, perubahan 1% pada variabel komite audit (X_3) menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif. Nilai koefisien variabel komite audit adalah 0,022 yang bernilai positif, dan dari nilai tersebut dapat didefinisikan bahwa variabel komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. akan menyebabkan peningkatan penghindaran pajak sebesar 0,022, atau 2,2% dari total .
5. Jika nilai koefisien regresi variabel lain tetap sama, maka perubahan satu persentase poin pada variabel profitabilitas (X_4) akan menghasilkan pengurangan penghindaran pajak sebesar lima belas persen. Variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena nilai koefisiennya adalah -0,157 yang bernilai negatif.

4.2.4. Hasil Uji Hipotesis

4.2.4.1. Koefisien Determinasi (R^2)

Antara nol dan satu, koefisien determinasi R^2 menunjukkan sejauh mana model dapat menjelaskan varians dalam variabel dependen. Terlepas dari apakah variabel independen baru memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap variabel dependen, menambahkannya ke model akan selalu menyebabkan R^2 meningkat, sehingga banyak peneliti menyarankan menggunakan nilai *Adjusted* R^2 untuk menentukan model regresi mana yang terbaik. Jika nilai R^2 mendekati 1 (semakin besar nilai R^2), maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen menyediakan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016).

Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,442 ^a	,195	,146	,041309

Sumber: Data Diolah, 2022 (Hasil Output IBM SPSS versi 23)

Dari nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,146 pada tabel hasil, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan profitabilitas menyumbang 14,6% dari variasi penghindaran pajak, sedangkan sisanya 85,4% dapat dikaitkan ke faktor lain.

4.2.4.2. Uji Simultan (Uji F)

Dalam penelitian ini, kami menggunakan analisis varians dua arah (ANOVA) untuk menilai dampak variabel dependen secara bersamaan. Tingkat signifikansi penerimaan dalam pengujian ini ditetapkan pada p-value kurang dari

0,05, dengan asumsi bahwa semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Tidak ada hubungan antara variabel independen dan dependen ketika tingkat signifikansi kurang dari 0,05 dan antara keduanya lebih besar dari 0,05. Hasil studi paralel ditunjukkan pada tabel 4.9 di bawah ini (F).

Tabel 4.9. Hasil Uji Simultan (F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,027	4	,007	3,944	,006 ^b
Residual	,111	65	,002		
Total	,138	69			

Sumber: Data Diolah, 2022 (Hasil Output IBM SPSS versi 23)

Dari output sebelumnya dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dapat diterapkan, dan variabel independen berpengaruh signifikan, karena nilai signifikansi pada tabel ANOVA adalah $0,006 < 0,05$.

4.2.4.3. Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Dalam pengaturan beberapa variabel independen, uji-t digunakan untuk menilai kepentingan relatif dari masing-masing variabel independen dalam menjelaskan pola yang diamati dari variabel dependen yang diminati.

Tabel 4.10. Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,102	,100		1,019	,312
	Kepemilikan Institusional (KI)	,053	,020	,296	2,579	,012
	Komisaris Independen (KoIn)	,153	,056	,311	2,721	,008
	Komite Audit (KOA)	,022	,031	,082	,704	,484
	Profitabilitas (ROE)	-,157	,085	-,218	-1,837	,071

Sumber: Data Diolah, 2022 (Hasil Output IBM SPSS versi 23)

Berdasarkan hasil output diatas dapat dilihat penjelasan secara detail berikut dibawah ini:

1. Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai beta (β) sebesar 0,053 dan nilai signifikan sebesar 0,012 yang lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima.
2. Variabel dewan komisaris independen memiliki nilai beta (β) sebesar 0,153 dan nilai signifikan sebesar 0,008 yang lebih kecil dari 0,05 dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima.
3. Variabel komite audit memiliki nilai beta (β) 0,022 dan nilai signifikan sebesar 0,484 nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_3 di tolak.
4. Variabel profitabilitas yang diukur dengan return on equity memiliki nilai beta (β) sebesar -0,157 dengan nilai signifikan sebesar 0,071 yang lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa H_4 ditolak.

Dari penjelasan diatas maka dapat dilihat pada tabel ringkasan penerimaan dan penolakan hipotesis dibawah ini

Tabel 4.11. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Keterangan	Hasil
H1 Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>	Dengan tingkat sig 0,012 < 0,05 yang dilihat pada tabel <i>coefficients</i> hasil uji t dan nilai (β) sebesar 0,053 memberi arah positif signifikan	Diterima
H2 Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .	Dapat dilihat dalam tabel <i>coefficients</i> uji t dengan nilai sig 0,008 < 0,05 dan (β) 0,153 yang memberi arah positif signifikan	Diterima
H3 Komite audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>	Dilihat dari hasil tabel <i>coefficients</i> uji t sebesar 0,484 > 0,05 dan nilai (β) sebesar 0,022 positif namun tidak signifikan	Ditolak
H4 Profitabilitas yang diukur menggunakan return on equity berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>	Memiliki nilai sig sebesar 0,071 > 0,05 dan nilai (β) -0,157 dengan arah negatif tidak signifikan yang dapat dilihat pada tabel <i>coefficients</i> uji t	Ditolak

Sumber: Data Diolah, 2022

4.3. Pembahasan

4.3.1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Uji t sebelumnya menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional pada penghindaran pajak signifikan secara statistik pada tingkat 0,05, menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memang berpengaruh terhadap strategi penghindaran pajak. Selanjutnya nilai koefisien (β) yang dapat dilihat pada tabel 4.10 *Coefficients* pada hasil uji t bahwa arah kepemilikan institusional adalah positif, dengan nilai 0,053, menunjukkan bahwa kemampuan untuk meminimalkan praktik penghindaran pajak meningkat dengan ukuran kepemilikan institusional pada suatu perusahaan.

Jensen & Meckling, (1976) dalam teori keagenan, kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam mengurangi ketegangan antara agen dan prinsipal mereka. Kehadiran kepemilikan institusional dalam satu perusahaan dapat meningkatkan efektivitas checks and balances dalam pengambilan keputusan manajerial.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wijayanti *et al.*, (2018) yang menemukan bahwa keberadaan kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap strategi penghindaran pajak.

4.3.2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak memiliki nilai signifikan dengan tingkat kepercayaan 0,05, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil uji hipotesis yang ada, menunjukkan bahwa hal tersebut berpengaruh terhadap

strategi penghindaran pajak. Berdasarkan koefisien regresi, jelas bahwa memiliki dewan komisaris yang tidak memihak dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mengawasi manajemen puncak dan mengurangi penghindaran pajak.

Menurut Jensen & Meckling, (1976) dalam teori agensi yang menyebutkan dengan adanya dewan komisaris independen yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak yang berwenang dan bertindak secara netral dapat meminimalkan praktik penghindaran pajak dalam suatu perusahaan serta dapat mempertahankan nilai perusahaan dalam sistem tata kelola yang baik. Perusahaan pada umumnya memiliki dewan komisaris indepen sebesar 30% dari jumlah anggota dewan komisaris perusahaan (Pohan, 2013).

Penelitian ini sejalan dengan teori agensi menurut Eisenhardt, (1989) menyebutkan bahwa teori agensi didasarkan atas beberapa asumsi-asumsi. Asumsi tersebut meliputi asumsi sifat dasar manusia, asumsi keorganisasian dan asumsi informasi. Asumsi karakter manusia, asumsi pengorganisasian diantara kelompok, dan asumsi perdagangan informasi menunjukkan bahwa manusia memiliki batasan dan selalu menghindari risiko. Sedangkan pihak yang independen berfungsi sebagai mediator antara agen dan prinsipal dan fungsi lainnya sebagai pemonitoring perilaku agen dalam melaksanakan tugas wewenang dengan tujuan para prinsipal.

Tetapi temuan penelitian ini tidak sesuai dengan temuan dari Ayu Praditasari N, K & Setiawan, P, E (2017) Akibatnya, praktik dan studi penghindaran pajak yang dilakukan oleh dewan komisaris independen tidak

terpengaruh Ayu & Suardana, (2014) dewan komisaris yang tidak memihak memiliki efek mengerikan pada skema penghindaran pajak.

4.3.3. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Tabel 4.10 menyajikan hasil temuan uji t yang diterapkan pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel KOA memiliki nilai signifikansi sebesar $0,484 > 0,05$ dan nilai regresi (β) sebesar 0,022 yang menunjukkan bahwa komite audit masih memberikan arah yang positif terhadap entitas, meskipun tidak signifikan.

Dalam teori agensi yang menyatakan bahwa ketika seorang agen dan pihak prinsipal menginginkan laba semaksimal mungkin tentunya perusahaan mengupayakan untuk membuat laporan keuangannya menunjukkan laba dan meminimalkan hutang atau beban pajaknya. Sedangkan perusahaan yang baik akan melalui proses tahapan audit yang baik yang sejalan dengan *good corporate governance*.

Temuan penelitian ini konsisten dengan teori keagenan, yang menunjukkan bahwa komite audit organisasi dapat memainkan peran kunci dalam mengurangi penghindaran pajak. Meskipun saran mereka tidak terlalu penting, komite audit dari perusahaan yang termasuk dalam penelitian ini tetap memberikannya.

Penelitian ini sejalan dengan peneliti terdahulu oleh Farida Nuraina, (2019) dengan hasil variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap praktik pehindaran pajak.

4.3.4. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil output tabel 4.10 menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak, dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,071 (lebih besar dari 0,05) dan nilai koefisien -157 (berarah negatif lemah).

Dalam teori agensi menjelaskan terdapat asimetri informasi antara pemegang saham dan manajer yang digunakan oleh calon investor untuk menilai keadaan suatu perusahaan apakah memiliki nilai yang tinggi, selain itu dalam teori agensi juga menjelaskan bahwa bisa saja terjadi perbedaan antara prinsipal dan agen terhadap kepentingan laba perusahaan dengan pemungut pajak. Pemungut pajak mengharapkan pemasukan semaksimal mungkin dari pemungutan pajak sementara pihak manajemen menginginkan laba semaksimal mungkin dan meminimalkan beban pajaknya (Puput Rahayu, 2019). Teori keagenan, yang didukung oleh penelitian ini, menyatakan bahwa perusahaan bernilai tinggi harus dikelola dengan baik dan menguntungkan. Return on equity digunakan untuk menghitung profitabilitas, yang dihitung dengan membandingkan laba bersih perusahaan setelah pajak dengan total modalnya.

Penelitian sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh I Gusti Ayu C. M., & K. A. Suardana, (2014) yang menunjukkan bahwa peningkatan profitabilitas memiliki dampak kontraproduktif pada penghindaran pajak. Semakin besar pengembalian ekuitas perusahaan, semakin baik bukti tabel. Bila melihat statistik deskriptif, 4.2, nilai rata-rata 0,09571 atau sebesar 9,5% yang dapat dikatakan bahwa variabel profitabilitas dalam penelitian ini memiliki tingkat profitabilitas cukup rendah dan faktor penyebab return on equity rendah adalah

kurang baiknya pengelolaan modal oleh manajemen dalam menghasilkan laba entitas. Kecilnya laba yang dihasilkan dapat memungkinkan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari pengujian dan pembahasan yang disajikan pada bab sebelumnya:

1. Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak dengan nilai sig sebesar $0,012 < 0,05$ dan nilai (β) sebesar $0,053$ yang dapat dilihat dalam tabel. 4.10. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan semakin meningkat kepemilikan institusi dalam firma maka semakin baik sistem tata kelola perusahaan tersebut dalam meminimalisasi Pratik penghindaran pajak.
2. Komisaris independen memiliki efek positif dan signifikan pada praktik penghindaran pajak dengan nilai sig $0,008 < 0,05$ dan nilai (β) $0,153$ yang dapat dilihat dalam tabel 4.10. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen maka semakin kuat sistem pengawasan dalam perusahaan tersebut dalam meminimalkan praktik penghindaran pajak.
3. Komite audit tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak dengan nilai sig $0,484 > 0,05$ dan nilai (β) $0,022$ yang dapat dilihat dalam tabel 4.10. Temuan menunjukkan bahwa kehadiran lebih banyak komite audit dalam suatu organisasi bermanfaat, tetapi memiliki sedikit pengaruh pada strategi penghindaran pajak.

4. Profitabilitas yang diukur menggunakan *ROE* tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak dengan nilai sig sebesar $0,07 > 0,05$ dan nilai (β) - 0,157 yang dapat dilihat dalam Tabel 4.10. Temuan ini menunjukkan bahwa profitabilitas, yang diukur dengan return on equity (*ROE*), menunjuk ke arah yang negatif dan tidak signifikan, dengan manajemen modal investor yang tidak efektif berkontribusi pada laba perusahaan yang rendah dan potensi celah dalam strategi penghindaran pajak.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan diharapkan penelitian ini dapat menjadi gambaran untuk evaluasi kinerja komite audit kedepannya dalam penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* agar melaksanakan tugas dan perannya dalam sistem pengawasan perusahaan untuk meminimalisasi adanya praktik penghindaran pajak secara berlebihan.
2. Bagi manajemen diharapkan penelitian ini menjadi gambaran dan evaluasi kinerja manajemen terutama profitabilitas yang menjadi ukuran suatu perusahaan untuk menghasilkan laba yang juga menjadi nilai perusahaan dimata investor, hasil dalam penelitian ini memiliki *return on equity* cukup rendah yang dapat dikatakan bahwa kurangnya kemampuan manajemen dalam mengelola modal yang disetor untuk menghasilkan laba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abigail. (2020). *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan (Perusahaan Manufaktur Sektor Food and Beverage yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018)*.
- Agustina, T. N., & Aris, M. A. (2016). Tax Avoidance : Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015). *Seminar Nasional Dan The 4th Call for Syariah Paper*, 295–307.
- Ariawan, i M. A. R. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 1831–1859.
- Ayu Praditasari, N. K., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 2017(1), 1229–1258.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/27647/18703>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *Https://Doi.Org/10.5465/Amr.1989.4279003*, 14(1), 57–74.
<https://doi.org/10.5465/AMR.1989.4279003>
- Farida Nuraina. (2019). *Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Sub Otomotif Dan Komponen yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2017)*.
- Fenny, W. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review*, 4 (1)(1), 1–11.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*.
- Gita Liony Putri. (2018). *Pengaruh dewan Komisaris Independen, Komite Audit, ROA dan DER Terhadap Tax Avoidance Pendekatan Operating Cash Flow Industri Perbankan di Asean*. <https://doi.org/http://eprints.perbanas.ac.id> di akses pada 21 oktober 2021
- I Gusti Ayu, C. M., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance , Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2, 525–539.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)

- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kep-117/M-MBU/2002. (n.d.). Penerapan Praktik Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Menteri Badan Usaha Milik Negara. In *Peraturan Pemerintah* (pp. 1–15). <http://jdih.bumn.go.id/baca/KEP-117/M-MBU/2002.pdf>
- KEP/31/M.EKUI/08/1999. (n.d.). *tentang pembentukan KNKCG*.
- KEP/49/M.EKON/11/2004. (n.d.). *Pedoman Umum Good Corporate Governance*.
- Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–421. <https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273>
- Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006. (2006). *TENTANG PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM*.
- Pirzada, Kashan Bin, M. Z., Mustapha, & Wickramasinghe, D. (2015). *Firm Performance, Institutional Ownership and Capital Structure : A Case of Malaysia*". *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 211. 170-176.
- Pohan. (2013). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Puput, R. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Sales Growth, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2013-2017). *STIE Perbanas Surabaya*, 1–18.
- Rahmawati, A., M.G. Wi, E., & Agusti, R. R. (2015). Pengaruh pengungkapan CSR dan GCG Terhadap Tax Avoidance. *Jrak*, 1(2), 139–166. <https://doi.org/https://media.neliti.com/media/publications/194076-ID-pengaruh-pengungkapan-corporate-social-r.pdf>
- Rimardhani, H., Hidayat, R., & Dwiatmanto, D. (2016). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012-2014). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 31(1), 167–175.
- Rizal Ardiansyah. (2017). *Pengaruh Good Corporate Governance dn Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Perbankan syariah Periode 2011-2015*.
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance: Studi empiris pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 85–98. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>
- Sari, M., & Paramitha Devi, H. (2018). Pengaruh Corporate Governance dan Karakteristik Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 298–306.
- Shierly, P., & Liana, S. (2017). Pricilia dan Susanto: Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial... *Jurnal Ekonomi*, XXII(02), 267–285.

- Shleifer, A., & R.W, V. (1986). Ownership Structure and Accounting Conservatism: A Literature Review. *Journal of Political Economy*, Vol.6 No.4, 461-488. <http://dx.doi.org/10.1086/261385>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- T.Kurniasih & Maria M. Ratna Sari. (2013). Perencanaan Pajak sebagai Strategi Penghematan Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 18(01). <https://doi.org/https://media.neliti.com/media/publications/44276-ID-pengaruh-return-on-assets-leverage-corporate-governance-ukuran-perusahaan-dan-ko.pdf>
- UU Pasal 1 No. 28 tahun. (2007). *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Uun, S., & Refany Oktavia, A. (2017). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 923–932.
- Wardani, M. P., Fahrudin, A., & Yulianda, F. (2017). Analysis of Successful Strategy to Develop Sustainable Marine Ecotourism in Gili Bawean Island, Gresik, East Java. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 89(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/89/1/012036>
- Wijayanti, A., Masitoh, E., & Sri Mulyani. (2018). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322–340. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Perusahaan yang Memenuhi Kriteria Sampel

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Tanggal Pencatatan
1.	INTP	Indocement Tunggul Prakasa Tbk.	05/12/1989
2.	SMBR	Semen Batu Raja (Persero) Tbk.	28/06/2013
3.	WTON	Wijaya Karya Beton Tbk.	18/04/2014
4.	ARNA	Arwana Citra Mulia Tbk.	17/07/2001
5.	MLIA	Mulia Industrindo Tbk.	17/01/1994
6.	INAI	Indal Aluminium Industry Tbk.	05/12/1994
7.	AGII	Aneka Gas Industri Tbk.	28/09/2016
8.	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk.	08/05/1995
9.	DPNS	Duta Pratiwi Nusantara Tbk.	08/08/1990
10	SRSN	Indo Acidatama Tbk.	11/01/1993
11	AKPI	Argha Karya Prima Industry Tbk.	18/12/1992
12	IGAR	Champion Pacific Indonesia Tbk.	05/11/1990
13	IMPC	Impack Pratama Industri Tbk.	17/12/2014
14	TALF	Tunas Arifin Tbk.	12/02/2001
15	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk.	18/03/1991
16	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	23/10/1989
17	FASW	Fajar Surya Wisesa Tbk.	19/12/1994
18	KDSI	Kedaung Setia Industrial Tbk.	26/07/1996
19.	SPMA	Suparma Tbk.	16/11/1994

Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2022

Lampiran 2. Data lampiran sebelum outlier

NO	Kode Perusahaan	Tahun	X1_KI	X2_KoIn	X3_KOA	X4_ROE	Y_ETR
1	INTP	2015	0,640	0,429	3	0,167	0,228
2		2016	0,792	0,429	3	0,148	0,066
3		2017	0,744	0,429	3	0,076	0,187

Disambung ke halaman selanjutnya

Lampiran 2. Sambungan

NO	Kode Perusahaan	Tahun	X1_KI	X2_KoIn	X3_KOA	X4_ROE	Y_ETR
4		2018	0,785	0,333	3	0,049	0,182
5		2019	0,755	0,333	3	0,080	0,195
6		2020	0,747	0,333	3	0,081	0,159
7	SMBR	2015	0,901	0,600	3	0,113	0,203
8		2016	0,988	0,600	3	0,083	0,258
9		2017	0,991	0,200	3	0,043	0,298
10		2018	0,980	0,400	3	0,022	0,477
11		2019	0,952	0,400	3	0,009	0,653
12		2020	0,946	0,500	3	0,003	0,699
13	WTON	2015	0,112	0,250	3	0,069	0,139
14		2016	0,195	0,250	3	0,113	0,172
15		2017	0,279	0,429	3	0,124	0,188
16		2018	0,130	0,429	3	0,155	0,214
17		2019	0,159	0,500	3	0,151	0,185
18		2020	0,139	0,400	3	0,035	0,056
19	ARNA	2015	0,341	0,333	4	0,075	0,254
20		2016	0,140	0,333	4	0,096	0,262
21		2017	0,140	0,500	4	0,119	0,265
22		2018	0,140	0,500	4	0,144	0,253
23		2019	0,140	0,500	3	0,185	0,254
24		2020	0,140	0,500	3	0,250	0,224
25	MLIA	2015	0,752	0,400	3	0,097	-0,180
26		2016	0,823	0,400	3	0,006	-2,018
27		2017	0,672	0,400	3	0,027	0,064
28		2018	0,672	0,500	3	0,084	0,286
29		2019	0,672	0,400	3	0,050	0,323
30		2020	0,672	0,400	3	0,021	0,543
31	INAI	2015	0,780	0,500	3	0,110	0,499

Disambung ke halaman selanjutnya

Lampiran 2. Sambungan

NO	Kode Perusahaan	Tahun	X1_KI	X2_KoIn	X3_KOA	X4_ROE	Y_ETR
32		2016	0,780	0,500	3	0,138	0,388
33		2017	0,717	0,500	3	0,139	0,261
34		2018	0,779	0,333	3	0,133	0,375
35		2019	0,779	0,500	3	0,105	0,303
36		2020	0,779	0,500	3	0,012	0,848
37	AGII	2015	0,378	0,500	3	0,017	0,317
38		2016	0,378	0,500	3	0,023	0,269
39		2017	0,378	0,500	3	0,029	0,271
40		2018	0,319	0,500	3	0,036	0,225
41		2019	0,454	0,500	3	0,031	0,251
42		2020	0,334	0,333	3	0,030	0,038
43	BUDI	2015	0,534	0,500	3	0,128	0,596
44		2016	0,530	0,500	3	0,234	0,269
45		2017	0,534	0,500	3	0,037	0,251
46		2018	0,534	0,500	3	0,042	0,297
47		2019	0,578	0,333	3	0,050	0,237
48		2020	0,578	0,333	3	0,051	0,032
49	DPNS	2015	0,599	0,333	3	0,037	0,167
50		2016	0,599	0,333	3	0,038	0,185
51		2017	0,599	0,333	3	0,022	0,212
52		2018	0,667	0,333	3	0,034	0,240
53		2019	0,667	0,333	3	0,014	0,257
54		2020	0,666	0,333	3	0,008	0,462
55	SRSN	2015	0,680	0,375	3	0,039	0,252
56		2016	0,680	0,375	3	0,027	0,879
57		2017	0,328	0,375	3	0,043	0,067
58		2018	0,328	0,375	3	0,081	0,238
59		2019	0,328	0,333	3	0,055	0,249

Disambung ke halaman selanjutnya

Lampiran 2. Sambungan

NO	Kode Perusahaan	Tahun	X1_KI	X2_ KoIn	X3_KOA	X4_ROE	Y_ ETR
60		2020	0,328	0,333	3	0,075	0,277
61	AKPI	2015	0,586	0,333	3	0,025	0,459
62		2016	0,586	0,333	3	0,047	0,310
63		2017	0,700	0,333	3	0,012	0,581
64		2018	0,702	0,333	3	0,052	0,300
65		2019	0,702	0,333	3	0,044	0,308
66		2020	0,702	0,333	3	0,050	0,623
67	IGAR	2015	0,848	0,333	3	0,138	0,187
68		2016	0,848	0,333	3	0,185	0,276
69		2017	0,848	0,333	3	0,164	0,244
70		2018	0,848	0,333	3	0,093	0,277
71		2019	0,848	0,333	3	0,113	0,272
72		2020	0,848	0,333	3	0,102	0,269
73	IMPC	2015	0,862	0,500	3	0,106	0,119
74		2016	0,862	0,500	3	0,103	0,236
75		2017	0,893	0,500	3	0,071	0,181
76		2018	0,898	0,500	3	0,082	0,102
77		2019	0,898	0,500	3	0,066	0,305
78		2020	0,900	0,500	3	0,079	0,289
79	TALF	2015	0,994	0,333	3	0,045	0,226
80		2016	0,994	0,333	3	0,040	0,226
81		2017	0,994	0,333	3	0,027	0,328
82		2018	0,994	0,333	3	0,057	0,723

Disambung ke halaman selanjutnya

Lampiran 2. Sambungan

NO	Kode Perusahaan	Tahun	X1_KI	X2_ KoIn	X3_KOA	X4_ROE	Y_ ETR
83		2019	0,994	0,333	3	0,027	0,723
84		2020	0,994	0,333	3	0,018	0,354
85	CPIN	2015	0,555	0,500	4	0,143	0,205
86		2016	0,555	0,500	5	0,185	0,435
87		2017	0,555	0,333	4	0,159	0,233
88		2018	0,555	0,333	4	0,235	0,230
89		2019	0,555	0,333	4	0,174	0,210
90		2020	0,555	0,333	3	0,165	0,193
91		JPFA	2015	0,469	0,400	3	0,056
92	2016		0,469	0,400	3	0,232	0,215
93	2017		0,469	0,500	3	0,128	0,383
94	2018		0,469	0,500	3	0,197	0,284
95	2019		0,469	0,500	3	0,151	0,281
96	2020		0,405	0,600	3	0,107	0,272
97	FASW	2015	0,818	0,400	3	0,098	-0,233
98		2016	0,858	0,400	3	0,246	0,059
99		2017	0,862	0,600	3	0,181	0,277
100		2018	0,871	0,333	3	0,328	0,293
101		2019	0,997	0,375	3	0,206	0,206
102		2020	0,997	0,333	3	0,077	0,026
103	KDSI	2015	0,757	0,500	3	0,027	0,230
104		2016	0,757	0,500	3	0,112	0,260

Disambung ke halaman selanjutnya

Lampiran 2. Sambungan

NO	Kode Perusahaan	Tahun	X1_KI	X2_KoIn	X3_KOA	X4_ROE	Y_ETR
105		2017	0,784	0,500	3	0,142	0,261
106		2018	0,784	0,333	3	0,138	0,262
107		2019	0,784	0,333	3	0,105	0,281
108		2020	0,784	0,400	3	0,091	0,272
109	SPMA	2015	0,551	0,600	3	0,039	-0,334
110		2016	0,757	0,600	3	0,075	0,272
111		2017	0,835	0,800	3	0,079	0,219
112		2018	0,924	0,800	3	0,066	0,158
113		2019	0,924	0,800	3	0,095	0,258
114		2020	0,924	0,835	3	0,106	0,169

Sumber: data diolah, 2022

Lampiran 3. Data outlier

NO	Kode Perusahaan	Tahun	X1_KI	X2_KoIn	X3_KOA	X4_ROE	Y_ETR
1	INTP	2016	0,792	0,429	3	0,148	0,066
2		2017	0,744	0,429	3	0,076	0,187
3	SMBR	2015	0,901	0,600	3	0,113	0,203
4		2017	0,980	0,200	3	0,043	0,298
5		2018	0,952	0,400	3	0,022	0,477
6		2019	0,952	0,400	3	0,009	0,653
7		2020	0,946	0,500	3	0,003	0,699
8	WTON	2020	0,139	0,400	3	0,035	0,056
9	ARNA	2015	0,341	0,333	4	0,075	0,254
10		2016	0,140	0,333	4	0,096	0,262
11		2017	0,140	0,500	4	0,119	0,265

Disambung ke halaman selanjutnya

Lampiran 3. Sambungan

NO	Kode Perusahaan	Tahun	X1_KI	X2_KoIn	X3_KOA	X4_ROE	Y_ETR
12	MLIA	2015	0,752	0,400	3	0,097	-0,180
13		2016	0,823	0,400	3	0,006	-2,018
14		2017	0,672	0,400	3	0,027	0,064
15		2020	0,672	0,400	3	0,021	0,543
16	INAI	2015	0,780	0,500	3	0,110	0,499
17		2016	0,780	0,500	3	0,138	0,388
18		2018	0,779	0,333	3	0,133	0,375
19		2020	0,779	0,500	3	0,012	0,848
20	AGII	2020	0,334	0,333	3	0,030	0,038
21	BUDI	2020	0,578	0,333	3	0,051	0,032
22	DPNS	2020	0,666	0,333	3	0,008	0,462
23	SRSN	2016	0,680	0,37	3	0,027	0,879
24		2017	0,328	0,375	3	0,043	0,067
25	AKPI	2015	0,586	0,333	3	0,025	0,459
26		2017	0,700	0,333	3	0,012	0,581
27		2020	0,702	0,333	3	0,050	0,623
28	IMPC	2015	0,862	0,500	3	0,106	0,119
29		2018	0,898	0,500	3	0,082	0,102
30	TALF	2018	0,994	0,333	3	0,057	0,723
31	CPIN	2016	0,555	0,500	5	0,185	0,435
32		2017	0,555	0,333	4	0,159	0,233
33		2019	0,555	0,333	4	0,174	0,210
34	JPFA	2018	0,469	0,500	3	0,197	0,284
35	FASW	2015	0,818	0,400	3	0,098	-0,233
36		2016	0,858	0,400	3	0,246	0,059

Disambung kehalaman selanjutnya

Lampiran 3. Sambungan

NO	Kode Perusahaan	Tahun	X1_KI	X2_KoIn	X3_KOA	X4_ROE	Y_ETR
37		2018	0,871	0,333	3	0,328	0,293
38		2020	0,997	0,333	3	0,077	0,026
39	KDSI	2017	0,784	0,500	3	0,142	0,261
40		2018	0,784	0,333	3	0,138	0,262
41		2019	0,784	0,333	3	0,105	0,281
42		2020	0,784	0,400	3	0,091	0,272
43	SPMA	2015	0,551	0,600	3	0,039	-0,334
44		2019	0,924	0,800	3	0,095	0,258

Sumber: data diolah, 2022

Lampiran 4. Data setelah Outlier

NO	Kode Perusahaan	Tahun	X1_KI	X2_KoIn	X3_KOA	X4_ROE	Y_ETR
1	INTP	2015	0,640	0,429	3	0,167	0,228
2		2018	0,785	0,333	3	0,049	0,182
3		2019	0,755	0,333	3	0,080	0,195
4		2020	0,747	0,333	3	0,081	0,159
5	SMBR	2016	0,991	0,600	3	0,083	0,258
6	WTON	2015	0,112	0,250	3	0,069	0,139
7		2016	0,195	0,600	3	0,113	0,172
8		2017	0,279	0,429	3	0,124	0,188
9		2018	0,130	0,429	3	0,155	0,214
10		2019	0,159	0,500	3	0,151	0,185
11	ARNA	2018	0,140	0,400	4	0,144	0,253
12		2019	0,140	0,333	3	0,185	0,254
13		2020	0,140	0,333	3	0,250	0,224
14	MLIA	2018	0,672	0,400	3	0,084	0,286
15		2019	0,672	0,400	3	0,050	0,323

Disambung ke halaman selanjutnya

Lampiran 4. Sambungan

NO	Kode Perusahaan	Tahun	X1_KI	X2_KoIn	X3_KOA	X4_ROE	Y_ETR
16	INAI	2017	0,717	0,500	3	0,139	0,261
17		2019	0,779	0,500	3	0,105	0,303
18	AGII	2015	0,378	0,500	3	0,017	0,317
19		2016	0,378	0,500	3	0,023	0,269
20		2017	0,378	0,500	3	0,029	0,271
21		2018	0,319	0,500	3	0,036	0,225
22		2019	0,454	0,333	3	0,031	0,251
23		BUDI	2015	0,534	0,500	3	0,128
24	2016		0,530	0,500	3	0,234	0,269
25	2017		0,534	0,500	3	0,037	0,251
26	2018		0,534	0,500	3	0,042	0,297
27	2019		0,578	0,333	3	0,050	0,237
28	DPNS	2015	0,599	0,333	3	0,037	0,167
29		2016	0,599	0,333	3	0,038	0,185
30		2017	0,599	0,333	3	0,022	0,212
31		2018	0,667	0,333	3	0,034	0,240
32		2019	0,667	0,333	3	0,014	0,257
33	SRSN	2015	0,680	0,375	3	0,039	0,252
34		2018	0,328	0,375	3	0,081	0,238
35		2019	0,328	0,333	3	0,055	0,249
36		2020	0,328	0,333	3	0,075	0,277
37	AKPI	2016	0,586	0,333	3	0,047	0,310
38		2018	0,702	0,333	3	0,052	0,300
39		2019	0,702	0,333	3	0,044	0,308
40	IGAR	2015	0,848	0,333	3	0,138	0,187

Disambung kehalaman selanjutnya

Lampiran 4. Sambungan

NO	Kode Perusahaan	Tahun	X1_KI	X2_KoIn	X3_KOA	X4_ROE	Y_ETR
41		2016	0,848	0,333	3	0,185	0,276
42		2017	0,848	0,333	3	0,164	0,244
43		2018	0,848	0,333	3	0,093	0,277
44		2019	0,848	0,333	3	0,113	0,272
45		2020	0,848	0,333	3	0,102	0,269
46	IMPC	2016	0,862	0,500	3	0,103	0,236
47		2017	0,893	0,500	3	0,071	0,181
48		2019	0,898	0,500	3	0,066	0,305
49		2020	0,900	0,500	3	0,079	0,289
50	TALF	2015	0,994	0,333	3	0,045	0,226
51		2016	0,994	0,333	3	0,040	0,226
52		2017	0,994	0,333	3	0,027	0,328
53		2019	0,994	0,333	3	0,027	0,723
54		2020	0,994	0,333	3	0,018	0,354
55	CPIN	2015	0,555	0,500	4	0,143	0,205
56		2018	0,555	0,333	4	0,235	0,230
57		2020	0,555	0,333	3	0,165	0,193
58	JPFA	2015	0,469	0,400	3	0,056	0,248
59		2016	0,469	0,400	3	0,232	0,215
60		2017	0,469	0,500	3	0,128	0,383
61		2019	0,469	0,500	3	0,151	0,281
62		2020	0,405	0,600	3	0,107	0,272
63	FASW	2017	0,862	0,600	3	0,181	0,277
64		2019	0,997	0,375	3	0,206	0,206
65	KDSI	2015	0,757	0,500	3	0,027	0,230
66		2016	0,757	0,500	3	0,112	0,260
67	SPMA	2016	0,757	0,600	3	0,075	0,272
68		2017	0,835	0,800	3	0,079	0,219

Disambung ke halaman selanjutnya

Lampiran 4. Sambungan

NO	Kode Perusahaan	Tahun	X1_KI	X2_ KoIn	X3_KOA	X4_ROE	Y_ETR
69		2018	0,924	0,800	3	0,066	0,158
70		2020	0,924	0,835	3	0,106	0,169

Sumber: data diolah, 2022

Lampiran 5.1. Kertas Kerja Sebelum Tabulasi Data

NO	Kode Perusahaan	Tahun	Jumlah Kepemilikan Institusional	Jumlah Saham yang Beredar	KI
1	INTP	2015	2.357.216.097,00	3.681.231.699,00	0,640
2	SMBR	2015	8.867.274.600,00	9.837.678.500,00	0,901
3	WTON	2015	977.519.049,00	8.715.466.600,00	0,112
4	ARNA	2015	2.504.897.500,00	7.341.430.976,00	0,341
5	MLIA	2015	995.394.022,00	1.323.000.000,00	0,752
6	INAI	2015	247.066.700,00	316.800.000,00	0,780
7	AGII	2015	1.158.747.000,00	3.066.660.000,00	0,378
8	BUDI	2015	2.402.593.996,00	4.498.997.362,00	0,534
9	DPNS	2015	198.235.935,00	331.129.952,00	0,599
10	SRSN	2015	4.093.850.845,00	6.020.000.000,00	0,680
11	AKPI	2015	398.748.353,00	680.000.000,00	0,586
12	IGAR	2015	824.612.420,00	972.204.500,00	0,848
13	IMPC	2015	4.165.807.954,00	4.833.500.000,00	0,862
14	TALF	2015	1.345.097.700,00	1.353.435.000,00	0,994
15	CPIN	2015	9.106.385.410,00	16.398.000.000,00	0,555
16	JPFA	2015	1.366.664.650,00	2.911.590.000,00	0,469
17	FASW	2015	2.026.477.462,00	2.477.888.787,00	0,818
18	KDSI	2015	306.488.500,00	405.000.000,00	0,757
19	SPMA	2015	1.165.700.897,00	2.114.570.958,00	0,551
20	INTP	2016	2.914.375.114,00	3.681.231.699,00	0,792
21	SMBR	2016	9.715.450.200,00	9.837.678.500,00	0,988
22	WTON	2016	1.696.399.947,00	8.715.466.600,00	0,195
23	ARNA	2016	1.025.450.000,00	7.341.430.976,00	0,140
24	MLIA	2016	1.088.600.422,00	1.323.000.000,00	0,823
25	INAI	2016	247.066.700,00	316.800.000,00	0,780
26	AGII	2016	1.158.747.000,00	3.066.660.000,00	0,378
27	BUDI	2016	2.402.593.996,00	4.498.997.362,00	0,534
28	DPNS	2016	198.235.935,00	331.129.952,00	0,599
29	SRSN	2016	4.093.850.845,00	6.020.000.000,00	0,680
30	AKPI	2016	398.748.353,00	680.000.000,00	0,586
31	IGAR	2016	824.612.420,00	972.204.500,00	0,848
32	IMPC	2016	4.165.807.954,00	4.833.500.000,00	0,862
33	TALF	2016	1.345.097.700,00	1.353.435.000,00	0,994
34	CPIN	2016	9.106.385.410,00	16.398.000.000,00	0,555
35	JPFA	2016	1.366.664.650,00	2.911.590.000,00	0,469
36	FASW	2016	2.125.296.499,00	2.477.888.787,00	0,858
37	KDSI	2016	306.488.500,00	405.000.000,00	0,757
38	SPMA	2016	1.599.759.797,00	2.114.570.958,00	0,757

Disambung ke halaman selanjutnya

Lampiran 5.1 Sambungan

NO	Kode Perusahaan	Tahun	Jumlah Kepemilikan Institusional	Jumlah Saham yang Beredar	KI
39	INTP	2017	2.737.054.030	3.681.231.699	0,744
40	SMBR	2017	9.750.397.748	9.837.678.500	0,991
41	WTON	2017	2.430.685.481	8.715.466.600	0,279
42	ARNA	2017	1.026.150.000	7.341.430.976	0,140
43	MLIA	2017	889.685.722	1.323.000.000	0,672
44	INAI	2017	454.385.400	633.600.000	0,717
45	AGII	2017	1.158.747.000	3.066.660.000	0,378
46	BUDI	2017	2.402.593.996	4.498.997.362	0,534
47	DPNS	2017	198.235.935	331.129.952	0,599
48	SRSN	2017	1.974.198.800	6.020.000.000	0,328
49	AKPI	2017	476.175.852	680.000.000	0,700
50	IGAR	2017	824.612.420	972.204.500	0,848
51	IMPC	2017	4.317.042.954	4.833.500.000	0,893
52	TALF	2017	1.345.716.799	1.353.435.000	0,994
53	CPIN	2017	9.106.385.410	16.398.000.000	0,555
54	JPFA	2017	1.366.664.650	2.911.590.000	0,469
55	FASW	2017	2.136.259.799	2.477.888.787	0,862
56	KDSI	2017	317.691.000	405.000.000	0,784
57	SPMA	2017	1.764.759.797	2.114.570.958	0,835
58	INTP	2018	2.889.865.519	3.681.231.699	0,785
59	SMBR	2018	9.737.467.109	9.932.534.336	0,980
60	WTON	2018	1.130.469.754	8.715.466.600	0,130
61	ARNA	2018	1.026.388.000	7.341.430.976	0,140
62	MLIA	2018	889.685.722	1.323.000.000	0,672
63	INAI	2018	493.734.400	633.600.000	0,779
64	AGII	2018	978.990.000	3.066.660.000	0,319
65	BUDI	2018	2.402.568.831	4.498.997.362	0,534
66	DPNS	2018	220.774.238	331.129.952	0,667
67	SRSN	2018	1.974.198.800	6.020.000.000	0,328
68	AKPI	2018	477.478.323	680.000.000	0,702
69	IGAR	2018	824.612.420	972.204.500	0,848
70	IMPC	2018	4.341.089.454	4.833.500.000	0,898
71	TALF	2018	1.345.715.600	1.353.435.000	0,994
72	CPIN	2018	9.106.385.410	16.398.000.000	0,555
73	JPFA	2018	1.366.664.650	2.911.590.000	0,469
74	FASW	2018	2.157.744.599	2.477.888.787	0,871
75	KDSI	2018	317.691.000	405.000.000	0,784
76	SPMA	2018	1.953.225.197	2.114.570.958	0,924

Disambung kehalaman Selanjutnya

Lampiran 5.1. Sambungan

NO	Kode Perusahaan	Tahun	Jumlah Kepemilikan Institusional	Jumlah Saham yang Beredar	KI
77	INTP	2019	2.780.654.158	3.681.231.699	0,755
78	SMBR	2019	9.453.776.200	9.932.534.336	0,952
79	WTON	2019	1.383.310.565	8.715.446.600	0,159
80	ARNA	2019	1.030.000.000	7.341.430.976	0,140
81	MLIA	2019	889.685.722	1.323.000.000	0,672
82	INAI	2019	493.734.400	633.600.000	0,779
83	AGII	2019	1.393.712.956	3.066.660.000	0,454
84	BUDI	2019	2.602.568.831	4.498.997.362	0,578
85	DPNS	2019	220.774.238	331.129.952	0,667
86	SRSN	2019	1.974.198.800	6.020.000.000	0,328
87	AKPI	2019	477.478.323	680.000.000	0,702
88	IGAR	2019	824.612.420	972.204.500	0,848
89	IMPC	2019	4.341.088.454	4.833.500.000	0,898
90	TALF	2019	1.345.715.600	1.353.435.000	0,994
91	CPIN	2019	9.106.385.410	16.398.000.000	0,555
92	JPFA	2019	1.366.664.650	2.911.590.000	0,469
93	FASW	2019	2.470.733.140	2.477.888.787	0,997
94	KDSI	2019	317.691.000	405.000.000	0,784
95	SPMA	2019	1.953.225.197	2.114.570.958	0,924
96	INTP	2020	2.750.722.966	3.681.231.699	0,747
97	SMBR	2020	9.393.050.800	9.932.534.336	0,946
98	WTON	2020	1.210.689.619	8.715.446.600	0,139
99	ARNA	2020	1.027.150.000	7.341.430.976	0,140
100	MLIA	2020	889.685.722	1.323.000.000	0,672
101	INAI	2020	493.484.400	633.600.000	0,779
102	AGII	2020	1.024.031.540	3.066.660.000	0,334
103	BUDI	2020	2.602.568.831	4.498.997.362	0,578
104	DPNS	2020	220.574.238	331.129.952	0,666
105	SRSN	2020	1.974.198.800	6.020.000.000	0,328
106	AKPI	2020	477.478.323	680.000.000	0,702
107	IGAR	2020	824.612.420	972.204.500	0,848
108	IMPC	2020	4.349.189.854	4.833.500.000	0,900
109	TALF	2020	1.345.715.600	1.353.435.000	0,994
110	CPIN	2020	9.106.385.410	16.398.000.000	0,555
111	JPFA	2020	1.179.082.223	2.911.590.000	0,405
112	FASW	2020	2.470.733.140	2.477.888.787	0,997
113	KDSI	2020	317.691.000	405.000.000	0,784
114	SPMA	2020	1.953.225.197	2.114.570.958	0,924

Sumber: Data diolah, 2022

Lampiran 5.2 Kertas Kerja KoIn dan KOA

NO	Kode Perusahaan	Tahun	Jumlah Komisaris Independen perusahaan	Jumlah Dewan Komisaris	KoIn	KOA
1	INTP	2015	3	7	0,429	3
2	SMBR	2015	3	5	0,600	3
3	WTON	2015	2	8	0,250	3
4	ARNA	2015	1	3	0,333	4
5	MLIA	2015	2	5	0,400	3
6	INAI	2015	2	4	0,500	3
7	AGII	2015	3	6	0,500	3
8	BUDI	2015	2	4	0,500	3
9	DPNS	2015	1	3	0,333	3
10	SRSN	2015	3	8	0,375	3
11	AKPI	2015	2	6	0,333	3
12	IGAR	2015	1	3	0,333	3
13	IMPC	2015	2	4	0,500	3
14	TALF	2015	1	3	0,333	3
15	CPIN	2015	2	4	0,500	4
16	JPFA	2015	2	5	0,400	3
17	FASW	2015	2	5	0,400	3
18	KDSI	2015	2	4	0,500	3
19	SPMA	2015	3	5	0,600	3
20	INTP	2016	3	7	0,429	3
21	SMBR	2016	3	5	0,600	3
22	WTON	2016	2	8	0,250	3
23	ARNA	2016	1	3	0,333	4
24	MLIA	2016	2	5	0,400	3
25	INAI	2016	2	4	0,500	3
26	AGII	2016	3	6	0,500	3
27	BUDI	2016	2	4	0,500	3
28	DPNS	2016	1	3	0,333	3
29	SRSN	2016	3	8	0,375	3
30	AKPI	2016	2	6	0,333	3
31	IGAR	2016	1	3	0,333	3
32	IMPC	2016	2	4	0,500	3
33	TALF	2016	1	3	0,333	3
34	CPIN	2016	2	4	0,500	5
35	JPFA	2016	2	5	0,400	3
36	FASW	2016	2	5	0,400	3
37	KDSI	2016	2	4	0,500	3
38	SPMA	2016	3	5	0,600	3
39	INTP	2017	3	7	0,429	3
40	SMBR	2017	1	5	0,200	3
41	WTON	2017	3	7	0,429	3
42	ARNA	2017	2	4	0,500	4
43	MLIA	2017	2	5	0,400	3
44	INAI	2017	2	4	0,500	3
45	AGII	2017	3	6	0,500	3
46	BUDI	2017	2	4	0,500	3
47	DPNS	2017	1	3	0,333	3

Lampiran 5.2 Sambungan

NO	Kode Perusahaan	Tahun	Jumlah Komisaris Independen perusahaan	Jumlah Dewan Komisaris	KoIn	KOA
48	SRSN	2017	3	8	0,375	3
49	AKPI	2017	2	6	0,333	3
50	IGAR	2017	1	3	0,333	3
51	IMPC	2017	1	2	0,500	3
52	TALF	2017	1	3	0,333	3
53	CPIN	2017	1	3	0,333	4
54	JPFA	2017	3	6	0,500	3
55	FASW	2017	3	5	0,600	3
56	KDSI	2017	2	4	0,500	3
57	SPMA	2017	4	5	0,800	3
58	INTP	2018	2	6	0,333	3
59	SMBR	2018	2	5	0,400	3
60	WTON	2018	3	7	0,429	3
61	ARNA	2018	2	4	0,500	4
62	MLIA	2018	2	4	0,500	3
63	INAI	2018	1	3	0,333	3
64	AGII	2018	3	6	0,500	3
65	BUDI	2018	2	4	0,500	3
66	DPNS	2018	1	3	0,333	3
67	SRSN	2018	3	8	0,375	3
68	AKPI	2018	2	6	0,333	3
69	IGAR	2018	1	3	0,333	3
70	IMPC	2018	1	2	0,500	3
71	TALF	2018	1	3	0,333	3
72	CPIN	2018	1	3	0,333	4
73	JPFA	2018	3	6	0,500	3
74	FASW	2018	1	3	0,333	3
75	KDSI	2018	1	3	0,333	3
76	SPMA	2018	4	5	0,800	3
77	INTP	2019	2	6	0,333	3
78	SMBR	2019	2	5	0,400	3
79	WTON	2019	3	6	0,500	3
80	ARNA	2019	2	4	0,500	3
81	MLIA	2019	2	5	0,400	3
82	INAI	2019	1	2	0,500	3
83	AGII	2019	3	6	0,500	3
84	BUDI	2019	1	3	0,333	3
85	DPNS	2019	1	3	0,333	3

Disambung ke halaman selanjutnya

Lampiran 5.2 Sambungan

NO	Kode Perusahaan	Tahun	Jumlah Komisaris Independen perusahaan	Jumlah Dewan Komisaris	KoIn	KOA
86	SRSN	2019	2	6	0,333	3
87	AKPI	2019	2	6	0,333	3
88	IGAR	2019	1	3	0,333	3
89	IMPC	2019	1	2	0,500	3
90	TALF	2019	1	3	0,333	3
91	CPIN	2019	1	3	0,333	4
92	JPFA	2019	3	6	0,500	3
93	FASW	2019	3	8	0,375	3
94	KDSI	2019	1	3	0,333	3
95	SPMA	2019	4	5	0,800	3
96	INTP	2020	2	6	0,333	3
97	SMBR	2020	2	4	0,500	3
98	WTON	2020	2	5	0,400	3
99	ARNA	2020	2	4	0,500	3
100	MLIA	2020	2	5	0,400	3
101	INAI	2020	1	2	0,500	3
102	AGII	2020	2	6	0,333	3
103	BUDI	2020	1	3	0,333	3
104	DPNS	2020	1	3	0,333	3
105	SRSN	2020	2	6	0,333	3
106	AKPI	2020	2	6	0,333	3
107	IGAR	2020	1	3	0,333	3
108	IMPC	2020	1	2	0,500	3
109	TALF	2020	1	3	0,333	3
110	CPIN	2020	1	3	0,333	3
111	JPFA	2020	3	5	0,600	3
112	FASW	2020	3	9	0,333	3
113	KDSI	2020	2	5	0,400	3
114	SPMA	2020	5	6	0,833	3

Sumber: Data diolah, 2022

Lampiran 5.3. ROE

NO	Kode Perusahaan	Tahun	Laba Bersih Setelah Pajak	Total Ekuitas	ROE
1	INTP	2015	4.356.661.000.000,00	23.865.950.000.000,00	0,167
2	SMBR	2015	354.180.062.000,00	2.949.352.584.000,00	0,113
3	WTON	2015	171.784.021.770,00	2.263.425.161.325,00	0,069
4	ARNA	2015	71.209.943.348,00	894.728.477.056,00	0,075

Disambung kehalaman selanjutnya

Lampiran 5.3. Sambungan

NO	Kode Perusahaan	Tahun	Laba Bersih Setelah Pajak	Total Ekuitas	ROE
5	MLIA	2015	-155.911.654.000,00	1.115.119.044.000,00	-0,097
6	INAI	2015	28.498.388.713,00	239.820.902.657,00	0,110
7	AGII	2015	48.007.000.000,00	1.714.770.000.000,00	0,017
8	BUDI	2015	21.072.000.000,00	1.164.982.000.000,00	0,128
9	DPNS	2015	9.859.176.172,00	241.296.079.044,00	0,037
10	SRSN	2015	15.504.788.000,00	340.079.873,00	0,039
11	AKPI	2015	27.644.714.000,00	1.107.565.893.000,00	0,025
12	IGAR	2015	51.416.184.307,00	310.464.258.463,00	0,138
13	IMPC	2015	129.759.075.975,00	1.096.879.954.951,00	0,106
14	TALF	2015	33.717.725.980,00	350.202.023.192,00	0,045
15	CPIN	2015	1.736.178.000.000,00	12.786.663.000.000,00	0,143
16	JPFA	2015	524.484.000.000,00	6.109.692.000.000,00	0,056
17	FASW	2015	308.896.601.295,00	2.445.346.179.224,00	-0,098
18	KDSI	2015	11.470.563.293,00	378.921.289.074,00	0,027
19	SPMA	2015	-42.597.342.144,00	752.677.119.911,00	-0,039
20	INTP	2016	3.870.319.000.000,00	26.138.703.000.000,00	0,148
21	SMBR	2016	259.090.525.000,00	3.120.757.702.000,00	0,083
22	WTON	2016	281.567.627.374,00	2.490.474.913.654,00	0,113
23	ARNA	2016	91.375.910.975,00	948.088.201.259,00	0,096
24	MLIA	2016	9.039.563.000,00	1.613.099.694.000,00	0,006
25	INAI	2016	35.552.975.244,00	258.016.602.673,00	0,138
26	AGII	2016	64.287.000.000,00	2.760.840.000.000,00	0,023
27	BUDI	2016	38.624.000.000,00	164.982.000.000,00	0,234
28	DPNS	2016	10.009.397.103,00	265.835.387.367,00	0,038
29	SRSN	2016	11.056.051.000,00	402.053.633.000,00	0,027
30	AKPI	2016	52.393.857.000,00	1.120.035.169.000,00	0,047
31	IGAR	2016	69.305.629.795,00	373.749.035.530,00	0,185
32	IMPC	2016	125.823.130.775,00	1.225.645.183.071,00	0,103
33	TALF	2016	30.137.707.324,00	751.895.484.830,00	0,040
34	CPIN	2016	2.251.813.000.000,00	12.157.243.000.000,00	0,185
35	JPFA	2016	2.171.608.000.000,00	9.372.964.000.000,00	0,232
36	FASW	2016	778.012.761.625,00	3.158.442.463.132,00	0,246
37	KDSI	2016	47.127.349.067,00	419.784.286.104,00	0,112
38	SPMA	2016	81.063.430.679,00	1.079.146.551.310,00	0,075
39	INTP	2017	1.859.818.000.000,00	24.556.507.000.000,00	0,076
40	SMBR	2017	145.648.432.000,00	3.412.859.859.000,00	0,043
41	WTON	2017	340.458.859.391,00	2.747.935.334.085,00	0,124
42	ARNA	2017	122.183.909.643,00	1.029.399.792.539,00	0,119
43	MLIA	2017	47.534.072.000,00	1.754.295.083.000,00	0,027
44	INAI	2017	38.651.704.520,00	277.404.670.750,00	0,139

Disambung kehalaman selanjutnya

Lampiran 5.3. Sambungan

NO	Kode Perusahaan	Tahun	Lab a Bersih Setelah Pajak	Total Ekuitas	ROE
45	AGII	2017	97.598.000.000,00	3.358.010.000.000,00	0,029
46	BUDI	2017	45.691.000.000,00	1.226.484.000.000,00	0,037
47	DPNS	2017	5.963.420.071,00	273.264.403.585,00	0,022
48	SRSN	2017	17.698.567.000,00	415.505.899.000,00	0,043
49	AKPI	2017	13.333.970.000,00	1.126.612.491.000,00	0,012
50	IGAR	2017	72.376.683.136,00	441.946.749.143,00	0,164
51	IMPC	2017	91.303.491.940,00	1.289.020.969.663,00	0,071
52	TALF	2017	21.465.836.784,00	808.378.986.806,00	0,027
53	CPIN	2017	2.499.875.000.000,00	15.710.129.000.000,00	0,159
54	JPFA	2017	1.107.810.000.000,00	8.662.040.000.000,00	0,128
55	FASW	2017	595.868.198.714,00	3.288.317.572.389,00	0,181
56	KDSI	2017	68.965.208.549,00	485.539.501.109,00	0,142
57	SPMA	2017	92.280.117.234,00	1.172.195.335.156,00	0,079
58	INTP	2018	1.145.937.000.000,00	23.221.589.000.000,00	0,049
59	SMBR	2018	76.074.721.000,00	3.473.671.056.000,00	0,022
60	WTON	2018	486.640.174.453,00	3.136.812.010.205,00	0,155
61	ARNA	2018	158.207.798.602,00	1.096.596.429.104,00	0,144
62	MLIA	2018	189.082.238.000,00	2.241.367.974.000,00	0,084
63	INAI	2018	40.463.141.352,00	303.883.931.247,00	0,133
64	AGII	2018	114.374.000.000,00	3.147.729.000.000,00	0,036
65	BUDI	2018	50.467.000.000,00	1.194.700.000.000,00	0,042
66	DPNS	2018	9.380.137.352,00	277.708.599.001,00	0,034
67	SRSN	2018	38.735.092.000,00	477.788.016.000,00	0,081
68	AKPI	2018	64.226.271.000,00	1.233.833.753.000,00	0,052
69	IGAR	2018	44.672.438.405,00	482.914.243.337,00	0,093
70	IMPC	2018	105.523.929.164,00	1.372.223.331.022,00	0,082
71	TALF	2018	43.976.734.000,00	766.164.831.783,00	0,057
72	CPIN	2018	4.551.485.000.000,00	19.391.174.000.000,00	0,235
73	JPFA	2018	2.008.118.000.000,00	10.214.809.000.000,00	0,197
74	FASW	2018	1.405.367.771.073,00	4.288.337.297.565,00	0,328
75	KDSI	2018	76.761.902.211,00	555.171.029.401,00	0,138
76	SPMA	2018	82.232.722.269,00	1.254.609.679.208,00	0,066
77	INTP	2019	1.835.305.000.000,00	23.080.261.000.000,00	0,080
78	SMBR	2019	30.073.855.000,00	3.482.293.092.000,00	0,009
79	WTON	2019	510.711.733.403,00	3.390.572.999.124,00	0,151
80	ARNA	2019	217.675.239.509,00	1.176.781.762.600,00	0,185
81	MLIA	2019	126.773.341.000,00	2.532.966.885.000,00	0,050
82	INAI	2019	33.558.115.185,00	319.268.405.613,00	0,105
83	AGII	2019	103.431.000.000,00	3.299.564.000.000,00	0,031
84	BUDI	2019	64.021.000.000,00	1.285.318.000.000,00	0,050

Disambung kehalaman selanjutnya

Lampiran 5.3 Sambungan

NO	Kode Perusahaan	Tahun	Laba Bersih Setelah Pajak	Total Ekuitas	ROE
86	SRSN	2019	42.829.128.000,00	779.246.858.000,00	0,055
87	AKPI	2019	54.355.268.000,00	1.244.955.791.000,00	0,044
88	IGAR	2019	60.836.752.751,00	536.925.371.505,00	0,113
89	IMPC	2019	93.145.200.039,00	1.408.287.832.788,00	0,066
90	TALF	2019	27.456.246.966,00	1.008.291.258.921,00	0,027
91	CPIN	2019	3.642.226.000.000,00	20.895.858.000.000,00	0,174
92	JPFA	2019	1.793.914.000.000,00	11.896.814.000.000,00	0,151
93	FASW	2019	968.833.390.696,00	4.692.597.823.392,00	0,206
94	KDSI	2019	64.090.903.507,00	608.205.409.017,00	0,105
95	SPMA	2019	131.005.670.940,00	1.377.538.593.804,00	0,095
96	INTP	2020	1.806.337.000.000,00	22.176.248.000.000,00	0,081
97	SMBR	2020	10.981.673.000,00	3.407.888.607.000,00	0,003
98	WTON	2020	123.147.079.420,00	3.508.445.940.007,00	0,035
99	ARNA	2020	326.241.511.507,00	1.304.938.651.723,00	0,250
100	MLIA	2020	55.089.347.000,00	2.678.261.633.000,00	0,021
101	INAI	2020	3.991.581.552,00	321.404.082.596,00	0,105
102	AGII	2020	99.862.000.000,00	3.382.141.000.000,00	0,031
103	BUDI	2020	67.093.000.000,00	1.322.156.000.000,00	0,050
104	DPNS	2020	2.400.715.154,00	284.823.663.685,00	0,014
105	SRSN	2020	44.152.245.000,00	587.887.398.000,00	0,055
106	AKPI	2020	66.005.547.000,00	1.313.886.759.000,00	0,044
107	IGAR	2020	60.770.710.445,00	593.582.375.012,00	0,113
108	IMPC	2020	115.805.324.362,00	1.465.907.828.766,00	0,066
109	TALF	2020	18.488.700.221,00	1.020.185.316.228,00	0,027
110	CPIN	2020	3.845.833.000.000,00	23.333.031.000.000,00	0,174
111	JPFA	2020	1.221.904.000.000,00	11.411.970.000.000,00	0,151
112	FASW	2020	353.299.343.980,00	4.582.994.996.488,00	0,206
113	KDSI	2020	60.178.290.460,00	663.468.205.642,00	0,105
114	SPMA	2020	162.524.650.713,00	1.531.392.057.559,00	0,095

Sumber: Data diolah, 2022

Lampiran 5.4. ETR

NO	Kode Perusahaan	Tahun	Beban Pajak	Laba Sebelum Pajak	ETR
1	INTP	2015	1.287.915.000.000,00	5.644.567.000.000,00	0,228
2	SMBR	2015	89.234.190.000,00	443.414.252.000,00	0,203
3	WTON	2015	27.749.539.294,00	199.533.561.064,00	0,139
4	ARNA	2015	24.304.373.076,00	95.514.316.424,00	0,254
5	MLIA	2015	34.297.010.000,00	-190.208.664.000,00	-0,180
6	INAI	2015	28.498.388.713,00	57.114.061.880,00	0,499

Disambung ke halaman selanjutnya

Lampiran 5.4. Sambungan

NO	Kode Perusahaan	Tahun	Beban Pajak	Laba Sebelum Pajak	ETR
7	AGII	2015	22.309.000.000,00	70.316.000.000,00	0,317
8	BUDI	2015	31.053.000.000,00	52.125.000.000,00	0,596
9	DPNS	2015	1.972.849.888,00	11.832.026.060,00	0,167
10	SRSN	2015	5.209.875.000,00	20.714.663.000,00	0,252
11	AKPI	2015	23.494.252.000,00	51.138.966.000,00	0,459
12	IGAR	2015	11.820.161.899,00	63.236.346.206,00	0,187
13	IMPC	2015	17.445.790.361,00	147.204.866.336,00	0,119
14	TALF	2015	9.828.982.966,00	43.546.705.946,00	0,226
15	CPIN	2015	449.030.000.000,00	2.185.208.000.000,00	0,205
16	JPFA	2015	173.193.000.000,00	697.677.000.000,00	0,248
17	FASW	2015	94.049.915.767,00	-402.946.517.062,00	-0,233
18	KDSI	2015	3.419.704.975,00	14.890.268.268,00	0,230
19	SPMA	2015	14.218.505.978,00	-42.597.342.144,00	-0,334
20	INTP	2016	275.313.000.000,00	4.145.632.000.000,00	0,066
21	SMBR	2016	90.190.025.000,00	349.280.550.000,00	0,258
22	WTON	2016	58.691.974.024,00	340.259.601.398,00	0,172
23	ARNA	2016	32.462.388.949,00	123.838.299.924,00	0,262
24	MLIA	2016	17.921.139.000,00	-8.881.576.000,00	-2,018
25	INAI	2016	22.544.497.747,00	58.097.472.991,00	0,388
26	AGII	2016	23.628.000.000,00	87.915.000.000,00	0,269
27	BUDI	2016	14.208.000.000,00	52.832.000.000,00	0,269
28	DPNS	2016	2.278.665.403,00	12.288.056.506,00	0,185
29	SRSN	2016	1.483.538.000,00	1.688.362.000,00	0,879
30	AKPI	2016	23.558.754.000,00	75.952.611.000,00	0,310
31	IGAR	2016	26.468.958.222,00	95.774.588.017,00	0,276
32	IMPC	2016	38.973.036.457,00	164.796.167.232,00	0,236
33	TALF	2016	10.908.035.858,00	41.045.743.182,00	0,266
34	CPIN	2016	1.731.848.000.000,00	3.983.661.000.000,00	0,435
35	JPFA	2016	594.983.000.000,00	2.766.591.000.000,00	0,215
36	FASW	2016	48.716.855.404,00	826.729.617.029,00	0,059
37	KDSI	2016	16.570.567.066,00	63.697.916.133,00	0,260
38	SPMA	2016	30.295.064.563,00	111.358.495.242,00	0,272
39	INTP	2017	427.456.000.000,00	2.287.274.000.000,00	0,187
40	SMBR	2017	62.298.722.000,00	208.947.154.000,00	0,298
41	WTON	2017	79.042.760.767,00	419.501.620.158,00	0,188
42	ARNA	2017	44.020.031.331,00	166.203.941.034,00	0,265
43	MLIA	2017	3.249.865.000,00	50.783.937.000,00	0,064
44	INAI	2017	13.640.368.683,00	52.292.073.203,00	0,261
45	AGII	2017	36.222.000.000,00	133.820.000.000,00	0,271
46	BUDI	2017	15.325.000.000,00	61.016.000.000,00	0,251

Disambung ke halaman selanjutnya

Lampiran 5.4. Sambungan

NO	Kode Perusahaan	Tahun	Beban Pajak	Laba Sebelum Pajak	ETR
47	DPNS	2017	1.604.832.494,00	7.568.252.565,00	0,212
48	SRSN	2017	1.270.641.000,00	18.969.208.000,00	0,067
49	AKPI	2017	18.479.528.000,00	31.813.498.000,00	0,581
50	IGAR	2017	23.338.107.927,00	95.764.791.063,00	0,244
51	IMPC	2017	20.120.487.307,00	111.423.979.247,00	0,181
52	TALF	2017	10.488.314.450,00	31.954.151.234,00	0,328
53	CPIN	2017	759.947.000.000,00	3.259.822.000.000,00	0,233
54	JPFA	2017	666.950.000.000,00	1.740.595.000.000,00	0,383
55	FASW	2017	228.662.496.186,00	824.530.694.900,00	0,277
56	KDSI	2017	24.397.862.353,00	93.363.070.902,00	0,261
57	SPMA	2017	26.531.551.495,00	121.308.934.629,00	0,219
58	INTP	2018	254.291.000.000,00	1.400.228.000.000,00	0,182
59	SMBR	2018	69.281.988.000,00	145.356.709.000,00	0,477
60	WTON	2018	132.611.129.232,00	619.251.303.685,00	0,214
61	ARNA	2018	53.522.141.574,00	211.729.940.176,00	0,253
62	MLIA	2018	75.742.585.000,00	264.824.823.000,00	0,286
63	INAI	2018	24.293.955.742,00	64.757.097.094,00	0,375
64	AGII	2018	33.265.000.000,00	147.639.000.000,00	0,225
65	BUDI	2018	21.314.000.000,00	71.781.000.000,00	0,297
66	DPNS	2018	2.967.432.362,00	12.347.569.714,00	0,240
67	SRSN	2018	12.110.671.000,00	50.845.763.000,00	0,238
68	AKPI	2018	27.460.619.000,00	91.686.890.000,00	0,300
69	IGAR	2018	17.075.521.722,00	61.747.960.127,00	0,277
70	IMPC	2018	11.936.029.955,00	117.459.959.119,00	0,102
71	TALF	2018	43.976.734.000,00	60.866.228.487,00	0,723
72	CPIN	2018	1.355.866.000.000,00	5.907.351.000.000,00	0,230
73	JPFA	2018	829.926.000.000,00	2.918.114.000.000,00	0,284
74	FASW	2018	582.722.420.085,00	1.988.090.191.158,00	0,293
75	KDSI	2018	27.193.843.703,00	103.955.745.914,00	0,262
76	SPMA	2018	17.322.926.916,00	109.673.317.782,00	0,158
77	INTP	2019	439.122.000.000,00	2.247.427.000.000,00	0,195
78	SMBR	2019	56.498.410.000,00	86.572.265.000,00	0,653
79	WTON	2019	115.558.811.307,00	626.270.544.710,00	0,185
80	ARNA	2019	73.932.125.865,00	291.607.365.374,00	0,254
81	MLIA	2019	60.403.452.000,00	187.176.793.000,00	0,323
82	INAI	2019	14.558.321.695,00	48.116.436.880,00	0,303
83	AGII	2019	34.706.000.000,00	138.137.000.000,00	0,251
84	BUDI	2019	19.884.000.000,00	83.905.000.000,00	0,237
85	DPNS	2019	1.364.878.143,00	5.302.563.264,00	0,257
86	SRSN	2019	14.200.531.000,00	57.029.659.000,00	0,249

Disambung ke halaman selanjutnya

Lampiran 5.4. Sambungan

NO	Kode Perusahaan	Tahun	Beban Pajak	Laba Sebelum Pajak	ETR
87	AKPI	2019	24.146.137.000,00	78.501.405.000,00	0,308
88	IGAR	2019	22.697.694.487,00	83.534.447.014,00	0,272
89	IMPC	2019	40.827.845.760,00	133.973.045.799,00	0,305
90	TALF	2019	12.073.616.141,00	39.529.863.107,00	0,305
91	CPIN	2019	966.415.000.000,00	4.608.641.000.000,00	0,210
92	JPFA	2019	700.563.000.000,00	2.494.477.000.000,00	0,281
93	FASW	2019	251.762.339.014,00	1.220.595.729.710,00	0,206
94	KDSI	2019	30.835.922.008,00	94.926.825.515,00	0,325
95	SPMA	2019	45.634.690.184,00	176.640.361.124,00	0,258
96	INTP	2020	341.991.000.000,00	2.148.328.000.000,00	0,159
97	SMBR	2020	25.485.929.000,00	36.467.602.000,00	0,699
98	WTON	2020	7.357.730.549,00	130.504.809.969,00	0,056
99	ARNA	2020	94.384.895.323,00	420.626.406.830,00	0,224
100	MLIA	2020	65.454.858.000,00	120.544.205.000,00	0,543
101	INAI	2020	22.230.244.590,00	26.221.826.142,00	0,848
102	AGII	2020	3.683.000.000,00	96.179.000.000,00	0,038
103	BUDI	2020	2.219.000.000,00	69.312.000.000,00	0,032
104	DPNS	2020	2.060.314.341,00	4.461.029.495,00	0,462
105	SRSN	2020	16.875.622.000,00	61.027.867.000,00	0,277
106	AKPI	2020	25.328.611.000,00	40.676.936.000,00	0,623
107	IGAR	2020	22.396.075.884,00	83.166.786.329,00	0,269
108	IMPC	2020	50.671.603.733,00	175.476.928.095,00	0,289
109	TALF	2020	10.132.359.645,00	28.621.059.866,00	0,354

Sumber: Data diolah, 2022